

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
MALANG TAHUN ANGGARAN 2013-2015**

SKRIPSI



Oleh :

**DEWI LATIFA
NIM: 12510188**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
MALANG TAHUN ANGGARAN 2013-2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh :

**DEWI LATIFA
NIM: 12510188**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2013-2015**

SKRIPSI

Oleh:

DEWI LATIFA

NIM: 12510188

Telah Disetujui, 28 Agustus 2017

Dosen Pembimbing

Drs. Agus Sucipto, MM †
NIP 19670816 200312 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Drs. Agus Sucipto, MM †
NIP 19670816 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2013-2015**

SKRIPSI

Oleh

DEWI LATIFA
NIM : 12510188

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 04 Januari 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
M. Nanang Choiruddin,SE.,MM :
NIDT. 19850820201608011047

()

2. Sekretaris/ Pembimbing
Drs. Agus Sucipto.,MM :
NIP. 196708162003121001

()

3. Penguji Utama
Dr. Indah Yuliana,SE.,MM :
NIP. 197409182003122004

()

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan,



Drs. Agus Sucipto.,MM
NIP. 196708162003121001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Latifa
NIM : 12510188
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013-2015 adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 04 Januari 2018
Hormat Saya,



Dewi Latifa
Nim: 12510188

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT. Sholawat serta salam kami tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya ibunda tercinta Hj. Nur Khasanah dan ayahanda tercinta H. Syamsudin yang tidak pernah putus asa memberikan doa serta dukungan yang tulus sehingga menuju jalan kesuksesan. Serta suami saya Moch Hendri Frananda, dan saudara kandung saya H.yunus,dewi robiah,nur arifin,nikmatul khasanah,choirotul amin,zuhria,ning farikha,roudhatul janah, yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi dan sahabat-sahabat tercinta yang sudah memberikan dukungan serta motivasi yang tidak pernah putus. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua Amin...

MOTTO

***SEGALA YANG INDAH BELUM TENTU BAIK,
NAMUN SEGALA YANG BAIK SUDAH TENTU INDAH***



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap *Return* Saham dengan Suku Bunga (*BI Rate*) sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2014-2016)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen, dan Dosen Pembimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta memberikan nasehat-nasehat kepada penulis selama studi di Universitas ini, beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kedua Orang Tuaku Ayahanda H. Syamsudin dan Ibunda Hj.Nur Khasanah seta suami Moch Hendri yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moril dan spiritual.

6. Seluruh saudara laki-lakiku, perempuan dan tentunya tak lupa seluruh saudara iparku yang senantiasa memberikan doa serta dukungan baik secara moril dan spiritual.
7. Seluruh teman-teman seperjuanganku yang telah berjuang bersama-sama untuk memperoleh gelar Sarjana serta yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani dan memberikan semangat serta doa dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen angkatan 2012 yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan sumbangsih pemikiran dalam memperlancar penulisan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu-satu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak.

Malang, 10 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Teori	18
2.2.1. Pengertian Kinerja	18
2.2.2. Pengertian Kinerja Keuangan	19
2.2.3. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.2.4. Manfaat Kinerja	21
2.2.5. Definisi Pengukuran Kinerja	21
2.2.6. Laporan Keuangan	22
2.2.7. Aspek Pengukuran Kinerja	22
2.2.8. Tujuan Pengukuran Kinerja	24
2.2.9. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.9.1. Jenis-Jenis Rasio Keuangan	25
2.2.10. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29
2.2.11. Konsep Teori dalam Perseptif Islam	33
2.11.1 .Pendapatan Asli Daerah dalam Islam	33
2.11.2. Kinerja dalam Islam	38
2.2.12. Kerangka Berfikir	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Lokasi Penelitian	41
3.3. Subjek Penelitian	42
3.4. Data dan Sumber Data	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data	43
3.6. Metode Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data	47
4.1.1. Gambaran Kondisi Kabupaten Malang Secara Umum	47
4.1.2. Sejarah Berdirinya BPKAD	48
4.1.3. Visi dan Misi	52
4.1.4. Struktur Organisasi	54
4.1.5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	55
4.2.6. Rasio Aktivitas	83
4.2.7. Rasio Efektivitas	100
4.2.8. Rasio Pertumbuhan	102
4.3. Pembahasan	110
4.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	108
4.2.2. Rasio Aktivitas	109
4.2.3. Rasio Efektivitas	111
4.2.4. Rasio Pertumbuhan	112

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

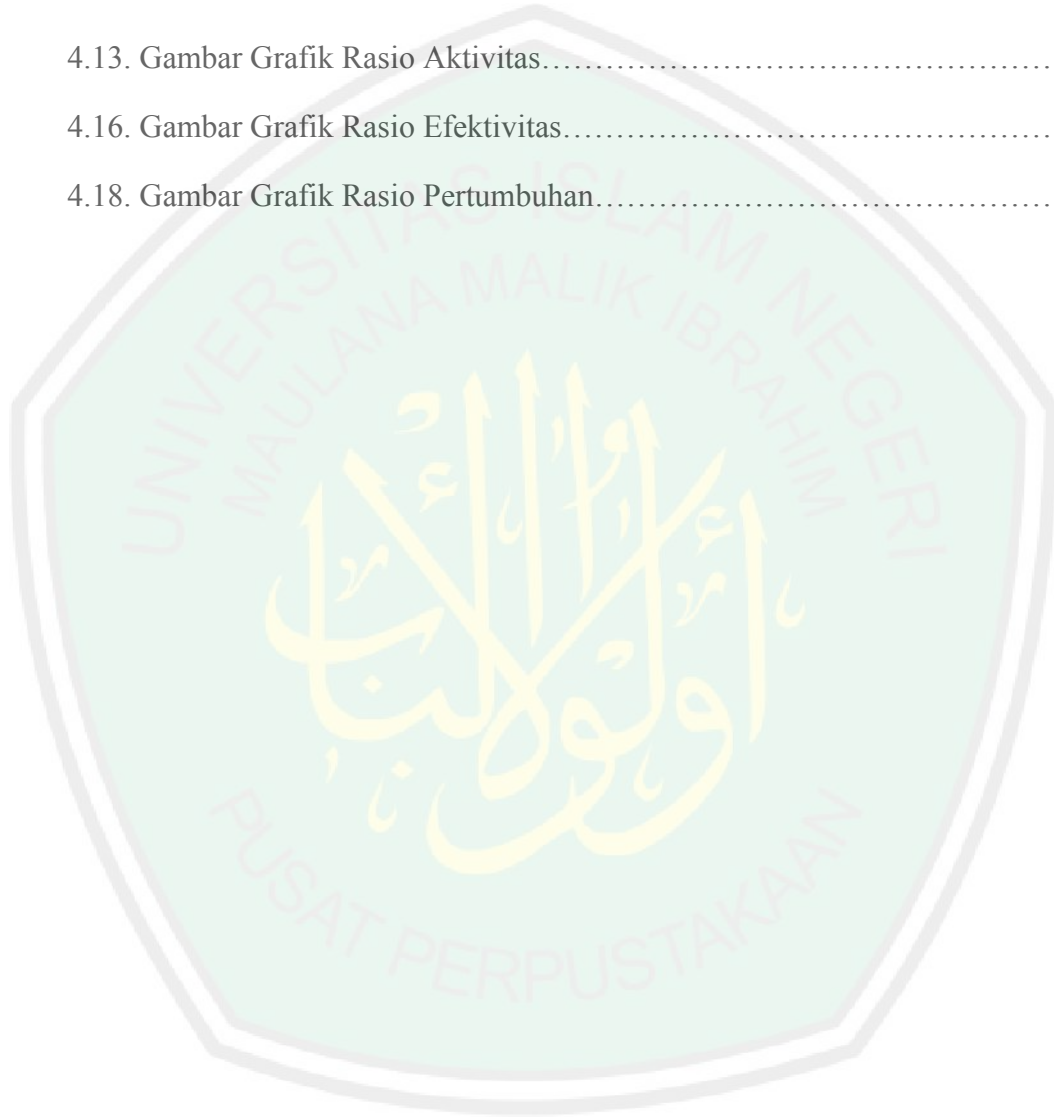
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data PAD Kabupaten Malang.....	9
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	13
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2.3 Pola Hubungan Kemandirian Kemampuan Daerah.....	26
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan.....	56
Tabel 4.2 Pola Hubungan dan Kemandirian Kemampuan Daerah.....	56
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013.....	57
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014.....	63
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015.....	70
Tabel 4.6 Rasio Kemandirian Kabupaten Malang Tahun 2013-2015.....	78
Tabel 4.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2013.....	84
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014.....	89
Tabel 4.10 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2015.....	93
Tabel 4.11 Rasio Belanja Tidak Langsung.....	97
Tabel 4.12 Rasio Belanja Langsung.....	97
Tabel 4.14 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan.....	100
Tabel 4.15 Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Malang.....	100
Tabel 4.17 Rasio Pertumbuhan Tahun 2013-2015.....	103

DAFTAR GAMBAR

2.2. Kerangka Berfikir.....	40
4.7. Gambar Grafik Rasio Kemandirian.....	78
4.13. Gambar Grafik Rasio Aktivitas.....	97
4.16. Gambar Grafik Rasio Efektivitas.....	101
4.18. Gambar Grafik Rasio Pertumbuhan.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Surat Keterangan Lulus Proposal
3. Surat Ijin Penelitian
4. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2013-2015



ABSTRAK

Dewi, Latifa. 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2015”.

Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dalam meningkatkan tingkat pelayanan dan kesejahteraan dari suatu bangsa dan negara. Adapun peningkatan tingkat pelayanan dan kesejahteraan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor eksternal pemerintah yang dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan melalui rasio kemandirian, efektivitas, aktifitas, dan pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada pemerintahan daerah kabupaten Malang tahun anggaran 2013-2015.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian dilakukan secara dinamis untuk menghasilkan kontruksi pemikiran dengan mengambil laporan realisasi APBD. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan melalui logging data atau analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Malang berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang sampai dengan tahun anggaran 2013-2015 perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan artinya adalah ketergantungan daerah masih sangat tinggi, terutama terhadap penerimaan dari bantuan pemerintah pusat berupa DAU/DAK. Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Malang sangat efektif karena penerimaan dari sektor seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Rasio aktivitas keuangan daerah Kabupaten Malang sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD relatif kecil. Rasio Pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Malang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif meskipun ada kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari rasio belanja pembangunan masih sangat kurang.

ABSTRACT

DEWI LATIFA. 2018. Thesis. Title: "An Analysis of the Regional Financial Performance of Malang of Budget Year of 2013-2015".

Supervisor: Drs. Agus Sucipto, MM

Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, and Growth Ratio

The government is an organization that is given the power to organize and manage in improving the level of service and prosperity of a nation and state. Increasing the level of service and welfare can be seen from the economic growth that is influenced by many factors such as government external factors that can be measured by the analysis of financial performance through the ratio of independence, effectiveness, activity, and growth. The research aims at determining the Regional Financial Performance of Malang of Budget Year of 2013-2015.

The type of research was qualitative descriptive. The object of research was done dynamically to generate the construction of thinking by taking the report of realization of Regional Expenditure Budget. The type of data used primary and secondary data. Analytical methods used logging data or data analysis.

The research results indicated that the average performance of financial management of Malang based on the analysis of financial independence ratio of Malang until the budget year of 2013-2015 about the calculation of regional financial independence ratio was unstable because it was still experiencing ups and down against the calculation result, means that the dependence of the area was very high, especially the receipt of central government assistance of General Allocation Fund or Special Allocation Fund. The financial effectiveness ratio of Malang was very effective because of the revenue of local tax and regional retribution. The most of fund in the ratio of financial activity of Malang was prioritized for routine expenditure requirement that can make small development expenditure ratio toward APBD. Financial Growth Ratio of Malang showed a positive growth rate, even though there was a decreasing tendency of growth. This can be seen from the small development expenditure ratio.

ملخص البحث

ديوي لطيفة. 2018. البحث الجامعي. العنوان: "تحليل الأداء المالي الإقليمي في مالانج للسنة الميزانية 2013-2015".

المشرف: أكوس سوجيفتو، الماجستير

الكلمات الرئيسية: نسبة الاستقلالية، نسبة الفعالية، نسبة الانشطة، ونسبة النمو

الحكومة هي المنظمة التي تعطى مخولة لتنظيم وإدارة المصالح في تحسين مستوى الخدمات والرفاه للأمة. يمكن أن ينظر من النمو الاقتصادي الذي يتأثر بعوامل كثيرة يعنى العوامل الخارجية الحكومة التي تمكن أن تقاس مع الأداء المالي من خلال تحليل نسبة الاستقلالية والفعالية و الانشطة والنمو. ويهدف هذا البحث إلى تحديد الأداء المالية الحكومة مالانج للسنة الميزانية 2013-2015.

هذا النوع البحث هو وصفي نوعي. والهدف البحث هو حيوي أي لتوليد بناء التفكير من خلال اتخاذ تقرير تحقيق تَقْدِيرُ الدَّخْلِ المَالِيّ الإقليمي . البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. وتستخدم الأساليب التحليلية من خلال تسجيل (logging) أو تحليل البيانات. دلت النتائج البحث أن أداء الإدارة المالية المتوسطة مالانج هو على أساس تحليل نسبة الاستقلالية المالية الحالية مالانج مع السنة الميزانية 2013-2015 حساب نسبة الاستقلالية الحالية هو أقل استقراراً لأنه شهد صعوداً وهبوطاً من نتيجة الحساب اي الاعتماد العال جدا ضد استلام المساعدة من الحكومة المركزية خاصة في شكل صندوق المخصصات العامة او صندوق المخصصات الخاصة. نسبة فعالية المالية الحالية مالانج هي فعالة جدا لأن العائدات من الضرائب والرسوم المحلية. نسبة النشاط المالي إلى حد كبير المملوكة للحكومات المحلية مالانج هي لتلبية احتياجات التسوق روتينية حتى أن نسبة الإنفاق التنمية ضد تَقْدِيرُ الدَّخْلِ المَالِيّ الإقليمي صغيرة نسبياً. وأظهرت نسبة النمو ان نمو ايجابية متوسطة ولكن هناك وجود اتجاه تناقص النمو. وهذا يمكن أن ينظر إليه من أقل نسبة الإنفاق التنمية

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada berlaku.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi

beberapa factor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik factor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Menurut Mahmudi (2010:98) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk

mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Terdapat dua alasan utama mengapa Pemerintah Daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

- a. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (internal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala Daerah kepada pegawai pemda-pemda dan DPRD.
- b. Dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (external accountability), yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. (Mariani, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah difahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive, artinya dibuat lebih umum dan dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Hasil peneliti Bayage (2014), menyatakan bahwa peneliti menunjukkan (1) Berdasarkan Rasio Derajat Otonomi Fiskal kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masih dalam kategori sangat kurang mampu, (2) Kemampuan keuangan yang dilihat dari indeks kemampuan rutin Kabupaten Malang periode 2009-2013 masih dalam kategori sangat kurang mampu, (3) Berdasarkan hasil yang didapatkan pada kemampuan keuangan pendapatan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masuk dalam kategori sedang hasil yang didapatkan sesuai dengan kategori partisipatif.

Hasil peneliti Agustina (2013), bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negative seperti rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan.

Hasil peneliti Agustiaruyani (2010), Hasil analisis sesuai dengan alat analisis yang digunakan untuk melihat tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dinilai dari segi rasio efektifitas dan efisiensi secara keseluruhan sangat efektif dan efisien, dengan tingkat efektifitas diatas 100% dan tingkat efisien dibawah 100%. Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Malang terhadap pihak luar masih tinggi, sedangkan untuk rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Malang masih kurang optimal dalam mengalokasikan dana pembangunannya, walaupun rasio pertumbuhannya positif.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. (Halim, 2004: 150).

b. Rasio Aktivitas

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%.

c. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi presentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan

pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. (Halim,2004:158)

Dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan untuk menghitung kemampuan Keuangan Daerah, kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk pengalihan Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha /wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dan perimbangan

(DAU, DAK dan bagi hasil dan bukan pajak) sehingga lebih profesional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintahan Pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBD untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

- a. Mengoptimalkan jenis jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- b. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
- c. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan yang sah	Pendapatan
2013	262.267.260.454,87	1.700.485.365.220,00	68.770.765.000,00	2.529.685.862.151,87
2014	411.185.107.107,13	1.831.998.927.025,00	156.715.906.000,00	3.058.671.277.833,13
2015	461.887.704.824,73	1.893.231.262.923,00	19.994.558.900,00	3.471.281.006.610,73

Sumber : BPKAD Kab Malang

Berdasarkan data yang tercantum dalam Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2013 PAD sebesar Rp262.267.260.454,87, dan dana perimbangan Rp1.700.485.365.220,00, sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap bantuan Pemerintah pusat, provinsi dan Pinjaman sebesar 11,49%. Tahun 2014 Realisasi PAD sebesar Rp411.185.107.107,13, dan dana Perimbangan Rp1.831.998.927.025,00 sehingga Rasio Kemandirian Realisasi PAD terhadap bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 17,56%. Tahun 2015 Realisasi PAD sebesar Rp461.887.704.824,73 dan dana perimbangan Rp1.893.231.262.923,00 Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman sebesar 19,75%.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti berusaha mengembangkan dan meneliti kembali yaitu dengan Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dihadapi adalah “Bagaimana kinerja keuangan daerah di Kabupaten Malang (Tahun Anggaran 2013-2015).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Malang ditinjau dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun berikutnya.

2. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti pada bidang yang sama.

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Agustina (2013) dalam penelitiannya tentang Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2007-2011). Hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, efektifitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negative seperti rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan.

Bayage (2014) meneliti tentang analisis kinerja keuangan daerah pada era Otonomi di Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan (1) Berdasarkan Rasio Derajat Otonomi Fiskal kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masih dalam kategori sangat kurang mampu,(2) Kemampuan keuangan yang dilihat dari indeks kemampuan rutin Kabupaten Malang periode 2009-2013 masih dalam kategori sangat kurang mampu,(3) Berdasarkan hasil yang didapatkan pada kemampuan keuangan pendapatan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masuk dalam kategori sedang hasil yang didapatkan sesuai dengan kategori partisipatif,(4) Kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam menyumbang

pendapatan daerah masih dalam kategori efektif,(5) Dimana pada tahun 2009-2013 rasio aktivitas masih stabil dan mengalami kenaikan tiap tahunnya, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan dalam rasio namun pada tahun 2013 rasio aktifitas belanja rutin mengalami kenaikan,(6) Dalam perkembangan indeks rasio pertumbuhan didapatkan nilai rasio pertumbuhan yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya.

Agustiariyani (2010) meneliti tentang analisis kinerja keuangan daerah dikabupaten Malang. Hasil analisis sesuai dengan alat analisis yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dinilai dari segi rasio efektifitas dan efisiensi secara keseluruhan sangat efektif dan efisien, dengan tingkat efektifitas diatas 100% dan tingkat efisien dibawah 100%. Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Malang terhadap pihak luar masih tinggi, sedangkan untuk rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Malang masih kurang optimal dalam menalokasikan dana pembangunannya, walaupun rasio pertumbuhannya positif.

Kadarwati (2012) meneliti tentang Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini, adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam penyelenggaraan Otonomi daerah pada tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2005. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan alat analisis yaitu teknik pengukuran value for money (ekonomi,efisiensi, dan efektivitas) dan rasio kinerja (rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi

daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Agustina (2013) Analisa Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2007-2011.	Analisis Regresi Berganda	Hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik
2.	Bayage (2014) analisis kinerja keuangan daerah pada era Otonomi daerah di Kabupaten Malang.	Data analisis menggunakan Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Indeks Kemampuan Rutin (IKR), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Aktivitas.	Dengan menunjukkan berdasarkan (1) Berdasarkan Rasio Derajat Otonomi Fiskal kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masih dalam menyumbang pendapatan daerah masih dalam kategori sangat kurang mampu, (2) Kemampuan keuangan yang dilihat dari indeks kemampuan rutin Kabupaten Malang periode 2009-2013 masih dalam kategori sangat kurang mampu, (3) Berdasarkan hasil yang didapatkan pada kemampuan keuangan pendapatan Kabupaten Malang dalam menyumbang

			pendapatan daerah masuk dalam kategori sedang hasil yang didapatkan sesuai dengan kategori partisipatif,(4) Kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masih dalam kategori efektif,(5) Dimana pada tahun 2009-2013 rasio aktivitas masih stabil dan mengalami kenaikan tiap tahunnya, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan dalam rasio namun pada tahun 2013 rasio aktifitas belanja rutin mengalami kenaikan,(6) Dalam perkembangan indeks rasio pertumbuhan didapatkan nilai rasio pertumbuhan yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya.
3.	Agustiariyani(2010) analisis kinerja keuangan daerah di kabupaten malang	Menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas.	Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dinilai dari segi rasio efektifitas dan efisiensi secara keseluruhan sangat efektif dan efisien, dengan tingkat efektifitas diatas 100% dan tingkat efisien dibawah 100%. Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan

			pemerintah daerah Kabupaten Malang terhadap pihak luar masih tinggi, sedangkan untuk rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Malang masih kurang optimal dalam menalokasikan dana pembangunannya, walaupun rasio pertumbuhannya positif.
4.	Kadarwati (2012) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi daerah dikabupaten Sukoharjo	Deskriptif komparatif	dengan menggunakan alat analisis yaitu teknik pengukuran value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dan rasio kinerja (rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja).
5	Dewi latifa (2018) Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2015.	Menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan	Dengan menggunakan rasio kemandirian tingkat kabupaten malang masih kurang stabil , rasio kinerja (rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur daerah terhadap

			total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja).
--	--	--	---

Data : Penelitian terdahulu diolah.



Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agustina (2013)	Analisi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2007-2011.	Variabel yang diteliti : analisis kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi	Tempat dan waktu sampel penelitian
2.	Bayage (2014)	analisis kinerja keuangan daerah pada era Otonomi daerah di Kabupaten Malang.	Variabel yang diteliti: analisis kinerja ditinjau dari kemandirian, efektivitas dan efisiensi	Variabel lain yang ingin di analisa analisa trend dalam prosentase, analisis presentase perkomponen
3.	Agustiariyani (2010)	Analisis kinerja keuangan daerah di kabupaten Malang	Variabel yang diteliti: menilai kinerja keuangan	Variabel yang lain yang ingin dianalisa laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan
4.	Kadarwati (2012)	Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah	Variabel yang diteliti : kinerja keuangan	Variabel yang lain yang dianalisa: perbandingan

		Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukpoharjo		serta metode yang digunakan
5	Dewi latifa (2018)	Anlisis Kinerja Keuangan daerah di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2015.	Variabel yang diteliti :menilai kinerja Keuangan	Variabel yang lain analisa dan metode yang digunakan.

Sumber: Penelitian terdahulu

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini yaitu variabel yang diteliti analisis kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat dan waktu sampel penelitian, analisa trend dalam prosentase, analisa laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan, serta menggunakan rasio pertumbuhan. Penelitian ini replikasi dari penelitian terdahulu Agustariyani karena dinilai dari analisis rasio keuangan daerah di kabupaten malang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2001:329) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi. Dan misi

organisasi terutang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Mardiasmo (2002:98) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja public adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial”. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:102) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD.
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

2.2.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.2.3 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja (Performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer, 1994). Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Menurut Haouston (2003 : 64) "Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan". Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *ability* (*knowledge + skill*), sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi

merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*. Menurut Mardiasmo (2002 : 121)” Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”.

2.2.4 Manfaat Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen
- b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya
- d. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- e. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (ulum,2004:277).

2.2.5 Definisi Pengukuran Kinerja

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi (Bastian,2001:329)

Sedangkan pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa maupun proses .Bastian,(2001:329)

Ukuran kinerja dan indicator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Maksudnya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam visi misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Bastian, (2001:121).

2.2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan sebagai sumber informasi akan lebih bermanfaat bila dilihat secara komprehensif dengan periode sebelumnya juga dapat dilihat efisien tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaannya (Munawir,2012:134)

Menurut Munawir (2012:142), mendefinisikan laporan keuangan sebagai “Laporan keuangan itu disusun untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (manajemen, kreditor, investor, pemerintah dan pihak-pihak lainnya”.

2.2.7 Aspek Pengukuran Kinerja

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut beberapa bidang analisis yang terkait satu dengan yang lainnya sesuai dengan publikasi pengukuran kinerja instansi Pemerintah oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek finansial, terdiri dari atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan.
2. Aspek kepuasan pelanggan (customers), yaitu bagaimana instansi pemerintahan merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus.
3. Aspek operasi bisnis internal ditujukan untuk informasi bisnis internal guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (*in-concert*) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, seperti yang tercantum dalam rencana strategis.
4. Aspek kepuasan pegawai, dalam setiap organisasi pegawai merupakan asset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis.
5. Aspek kepuasan komunitas dan stakeholders. Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan komunitas dan para pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

6. Aspek waktu ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
7. Aspek operasi bisnis internal ditujukan untuk informasi bisnis internal guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (*In-concert*) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis.
8. Aspek kepuasan pegawai, dalam setiap organisasi pegawai merupakan asset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis.
9. Aspek kepuasan komunitas dan stakeholders. Informasi dan pengukuran kinerja harus diesain untuk mengakomodasi kepuasan komunitas dan para pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.2.8 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*). Sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang.

Akan tetapi, Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (). Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi lebih baik

- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya
- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Ulum,2004:277).

2.2.9 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain (Ulum,2004:255)

1. DPRD sebagai wakil rakyat masyarakat
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.9.1 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Halim (2004:150) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. (Halim,2004:150)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat}} \times 100$$

Menurut Halim,2004, untuk mengetahui situasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 2.3
Pola Hubungan, Kemandirian Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif	Dimana peranan Pemerintah Pusat Lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah daerah
Rendah	25-50	Konsultatif	Dimana campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang
Sedang	50-75	Partisipatif	Dimana peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan ekonomi daerah
Tinggi	75-100	Delegatif	Dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan Otonomi daerah

Sumber:Halim,2004.

2. Rasio Aktifitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktivitas ini dapat formulasikan sebagai berikut : (Halim, 2004:153).

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Belanja Rutin /Aparatur}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja}}$$

3. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rilldaerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya. (Halim,2004:157)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Ketentuan :

- a. Jika > 100% berarti efektif
- b. Jika < 100% berarti tidak efektif
- c. Jika = 100% berarti efektifitas berimbang.

Sumber: Halim,2004.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi presentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. (Halim,2004:158)

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{to}}{\text{PAD}_{to}}$$

Dimana : to = tahun awal

T₁ = tahun akhir

2.2.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan membayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pendapatan daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP RI No.58 Tahun 2005).

Hubungan pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten sesuai dengan prinsip-prinsip Otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten. Hasilnya menyatakan bahwa hanya lain-lain PAD yang sah secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten.

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
 - b. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk

kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu 12 “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. UU No.32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan, Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan, Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurats dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

2.2.11 Konsep Teori dalam Persepektif Islam

2.11.1 Pendapatan Asli Daerah dalam Islam

Ilmu ekonomi islam sebuah studi ilmu ekonomi pengetahuan modern baru muncul pada 1970 an, tetapi pemikiran tentang ekonomi islam telah muncul sejak islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi islam adalah al quran dan hadist maka pemikiran ekonomi ini muncul juga bersamaan al quran dan masa kehidupan Rasulullah. Pemikiran ekonomi dikalangan muslim banyak mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia pada masa dimana barak masih dalam kegelapan. Pada masa tersebut dunia islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang pada saat kehidupan Rasulluah saw.

Masyarakat muslim dimasa beliau yang paling baik implementasi islam termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Madinah Rasulalloh memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab, meskipun perekonomian pada masa beliau relative masih sederhana tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelola ekonomi.

Pendapatan pada masa rasulullah dan sumber daya negara masih sangat kecil. Pendapatan negara meskipun nilainya relative tidak besar jika dibandingkan dengan biaya peperangan yang dikeluarkan. Usaha merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke 9 hijriyah. Pemanfaatannya ditentukan oleh rasulullah hanya boleh diberikan kepada pihak tertentu yang telah digariskan oleh al quran (QS. AT-Taubah:60).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat diatas beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari sumber :tembusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim. Khumus atau rikaz harta karun pada periode sebelum islam, amwalmfadlah (harta kaum muslimin tanpa meninggal ahli waris). Wakaf, nawaib, (pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat,.

Dalam Bahasa syariatnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalam hati masing-masing membayar pajak yang beriman). Sama sekali tidak memerlukan ijin undang-undang atau

perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan seerhana.

Gagasan seperti ini pada dasarnya merupakan intisari dari ajaran Rasulullah SAW bahwa sebagai pemahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia asal jangan sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang dihalalkan.

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Katsir bin Abdullah bin Amr bin uuf al- Muzamil dari ayahnya dan kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda, kaum muslimin itu bertransaksi dengan syaratnya, kecuali satu syarat yang tidak boleh dilakukan, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (HR. al Turmudzi).

Dalam konteks pajak ,negara harus melayani rakyat. Pengertian rakyat di sini adalah asnaf delapan tersebut. Rakyat di sini beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; bumi, laut, air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan rakyat. Ternyata yang menikmati adalah para pejabat yang korup.

Berdasarkan penjelasannya tersebut, maka jelaslah bahwa umat Islam pada akhirnya tidak memiliki kewajiban ganda, dan di sisi lain harus membayar pajak sebagai kewajiban sebagai seorang warga negara. Proses 34 transformasi lembaga pajak dapat digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau mensejajarkan lembaga pajak, seperti dipersepsikan orang selama ini. Saat ini, masih banyak pejabat-pejabat yang mengidap sia-sia pemahaman lama bahwa

uang negara itu upeti buat neraka. Mereka melakukan personalisasi kekuasaan terhadap asset-aset negara.

Semua bentuk dan jenis kekayaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan. Di dalam al Qur'an dikatakan khudz min amwalihim shadaqah yang berarti "Ambillah harta mereka sebagai sedekah" Disini disebut amwal dimana kekayaan tergantung perkembangan dalam dunia ekonomi. Pada zaman rasul mungkin onta. Sekarang pada masa modern unta bukan lagi primadona, tapi bias berupa bilyet, giro, cek, dan lain-lain, termasuk profesi itu bias dizakati.

Adapun dalam konteks PAD, Nampak bahwa pajak memenuhi semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi. Selain itu, pajak juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal.

Bahkan potensi ini lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari pajak saja dan retribusi daerah yang ada. Pajak sangat layak untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Lebih jelasnya, bahwa potensi pajak di Indonesia dan perbandigannya dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat jauh.

1. Hibah Sebagai PAD

Faktor yang paling dalam di syariatkan hibah adalah factor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah. Hibah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sepele apabila dilihat dari perbuatan hokum dan peristiwanya sendiri.

Dikatakan hibah pada asalnya adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Hibah menurut mazhab Syafi'I

adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapakan pahala dari Alla SWT.

Menurut mazhab Syafi'i Hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah dan pengertian khusus yang disebut hibah apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapakan ridho Allah SWT. Jika pemberian (hadiah) tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan yang diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapakan ridho Allah SWT atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah. Hibah Hikmatu Al-Tasyri (Filsafat Hukum Islam) adalah untuk memenuhi hasrat berbuat bagi umat islam yang beriman kepada Allah SWT (Al-Baqoroh ayat 177).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا أَوْ جُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah kebaikan-kebaikan itu menghadapkan ke wajah kamu kea rah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan), orang-orang yang memintaminta, dan membebaskan perbudakan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang memenuhi janjinya bila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan, dan pada waktu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. “ (QS. Al Baqarah: 177)

Berdasarkan ayat diatas harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebenarnya ada beberapa penerimaan yang bias disebut penghasilan oleh definisi Pasal 4 ayat (1) UU PPh 19984 tetapi oleh undang-undang sendiri ditetapkan sebagai bukan penghasilan yang diatur dipasal 4 ayat (3) UUPPh 1984. Pada posting kali ini akan diurang “penghasilan” yang berkaitan dengan hibah, bantuan, dan sumbangan sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008. Berikut adalah kutipan langsung sebagai dasar hukum :Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh 1984 [amandemen 2008] : Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kemudian ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh 1984 ini dijabarkan di Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008. Berikut bunyi Pasal 1 PMK tersebut : Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh : a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, b bdan keagamaan, c badan pendidikan.

2.11.2 Kinerja Dalam Islam

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi- fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan,suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja pada

dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari seluruh proses keaktifan karyawan yang bersangkutan. Allah swt berfirman

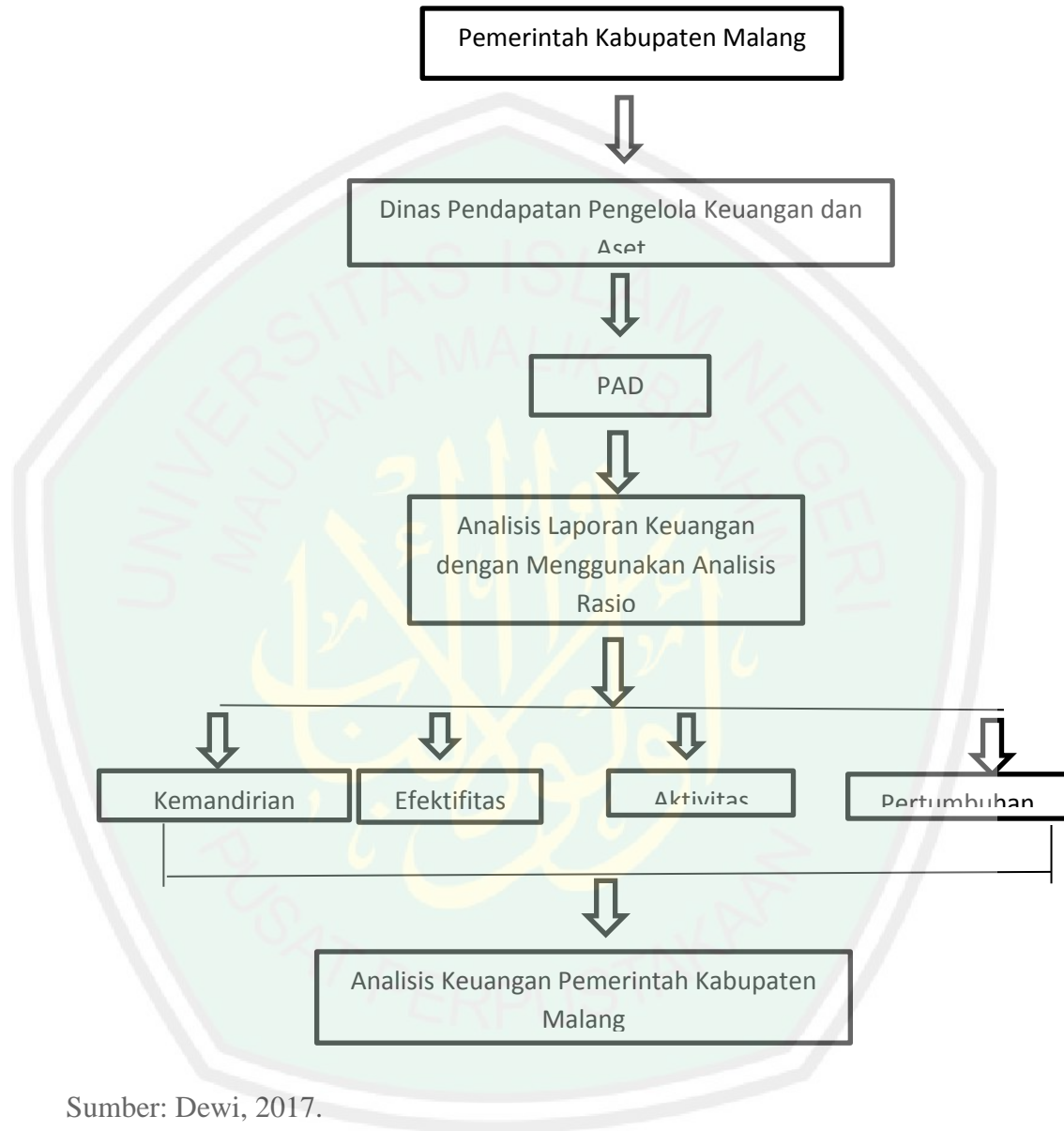
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah : 10)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. Menerangkan kepada manusia agar selain mengerjakan ibadah untuk akhirat, juga mengerjakan kewajiban didunia yaitu bekerja untuk mencari nafkah dan karunia-Nya dimuka bumi. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan perintah bekerja setelah perintah sholat. Artinya selama kita bekerja, hendaknya tidak lah lupa kepada Allah SWT.

2.2.12 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1



Sumber: Dewi, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Asset Kabupaten Malang, Jl.Kh Agus Salim No 7 Malang 65119.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menguraikan tentang perluasan suatu fenomena dan permasalahan secara utuh melalui kata-kata bahkan menggambarkan fenomena tersebut melalui angka. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya (Sugiyono,2011:9). Samiaji (2012:22) menjelaskan bahwa segala sesuatu yang melibatkan manusia yang bersifat kompleks dan multi dimensi, apalagi jika melibatkan sekelompok manusia dan interaksinya.

Menurut Moh Nazir (2003:4), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Jenis penelitian dengan metode deskriptif dirasa sesuai dengan tujuan penelitian ini. Tujuan studi deskriptif menurut Sekaran (2009:25) adalah untuk memberikan gambaran mengenai unsur-unsur yang relevan dengan fenomena perhatian dari pandangan seseorang, organisasi, orientasi-industri atau lainnya.

Dimana tujuan tersebut sejalan dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Daerah di Kabupaten Malang.

3.3 Subjek Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pimpinan Dinas Pendapatan, pengelolaan, dan Aset Kabupaten Malang dengan Bapak Ir Moehammad Nasri Abdul Wahid, M.Eng.Sc jabatan kepala bagian pengelola data sebagai informan penelitian ini.

3.4 Data dan jenis data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder berupa:

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Neraca
- d. Laporan operasional
- e. Laporan Arus kas
- f. Catatan atas laporan keuangan
- g. Profil Dinas Pendapatan dan Aset Pemerintahan Kabupaten Malang.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara Logging data, yaitu saat pengumpulan data penelitian yang diperlukan, maka menggunakan teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang diperlukan antara lain: Laporan perincian PAD Kabupaten Malang tahun 2013-2015.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif objek penelitian secara dinamis dan menghasilkan konstruksi pemikiran. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan resmi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Sebelum menjabarkan hasil temuan yang didapat peneliti selama penelitian kedalam narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Peneliti melakukan serangkaian prosedur analisis data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Serangkaian prosedur analisis data dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif melalui serangkaian proses sistematis. Proses analisis data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dengan menggunakan Rasio Keuangan yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. (Halim,2004:150)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat}} \times 100$$

Tabel 3.1

Pola Hubungan, Kemandirian Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber :Halim,2004

Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Aktifitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Secara sederhana, rasio aktivitas ini dapat formulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber :Halim, 2004:153.

3. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rilldaerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Ketentuan :

- a. Jika > 100% berarti efektif
- b. Jika < 100% berarti tidak efektif
- c. Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

Sumber : Halim,2004:157

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi presentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pema dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. (Halim,2004:158)

$$\text{Pertumbuhan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{to}}{\text{PAD}_{to}}$$

Dimana : to = tahun awal

T1= tahun akhir

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Gambaran Kondisi Kabupaten Malang Secara Umum

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112O17'10,90" – 112O57'00,00" Bujur Timur, 7 O44'55,11" – 8 O26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun 2013 sebesar Rp46.830.737,76, dan tahun 2014 mencapai sebesar Rp53.794.768,47. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2013 sebesar Rp17.901.923,01,

dan akhir tahun 2014 sebesar Rp18.992.150,12. Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,65% sedangkan Inflasi pada tahun 2013 sebesar 7,86%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,09% dikarenakan pada tahun 2014 Inflasi Naik menjadi sebesar 8,28%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu terjadinya kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya pendapatan perkapita tahun 2013 sebesar Rp18.630.284,77, dan tahun 2014 sebesar Rp19.247.046,-. Kontribusi sektoral pada tahun 2014 tidak dapat dirinci karena adanya perubahan tahun dasar dari 2000 menjadi 2010, sehingga yang semula kontribusi PDRB dibagi menjadi 9 Sektor nantinya akan berubah menjadi 17 sektor, dengan adanya perubahan tahun dasar tersebut maka kontribusi sektoral tahun 2014 dapat diketahui pada pertengahan tahun 2015.

4.1.2. Sejarah Berdiri BPKD

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dimana di dalamnya merupakan gabungan dari:

1. Kas Daerah (KASDA)
2. Bagian Perlengkapan
3. Bagian Keuangan dan
4. Dinas Pendapatan

Kemudian pada akhir 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah berupa nama menjadi DPPKA atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset, hingga sekarang yang memiliki 7(tujuh) UPTD meliputi

1. UPTD Ngantang
2. UPTD Singosari
3. UPTD Tumpang
4. UPTD Bululawang
5. UPTD Turen
6. UPTD Kepanjen
7. UPTD Pagak

Yang dipimpin oleh 1(satu) Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris DPPKA dan 4 Bidang antara lain:

1. Bidang Pendapatan
2. Bidang Anggaran
3. Bidang Akuntansi dan Pembukuan
4. Bidang Kekayaan dan
5. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD)

DPPKA ini terbentuk karena adanya dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melakukan penataan Organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang untuk penguatan kewenangan, Akuntabilitas kerja

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Tugasnya adalah memimpin, melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan bidang, pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pengembangan dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, kuasa BUD, asset akuntansi serta kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis yaitu Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dan Pengelolaan administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
2. Mengelola administrasi keuangan.
3. Menyusun laporan pengelolaan keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Bidang Pengembangan Dan Pendataan

Bidang pengembangan dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dibidang pengembangan dan pendataan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengembangan dan pendataan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan pendataan.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan pendataan.
3. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pendataan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
5. Seksi Pengembangan
6. Menyiapkan penyusunan program bidang pembangunan.
7. Menyiapkan bahan koordinasidan pelaksanaan teknis bidang pengembangan

b. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan petunjuk teknis dibidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
3. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggran pendapatan anggaran belanja dan pembiayaan.

c. Bidang Asset

Bidang asset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset dibidang asset. Dalam melaksanakan tugas Bidang Aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventaris dan penghapusan.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventaris dan penghapusan.
3. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan, inventaris dan penghapusan.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan prestasi dan pelayanan.
3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan

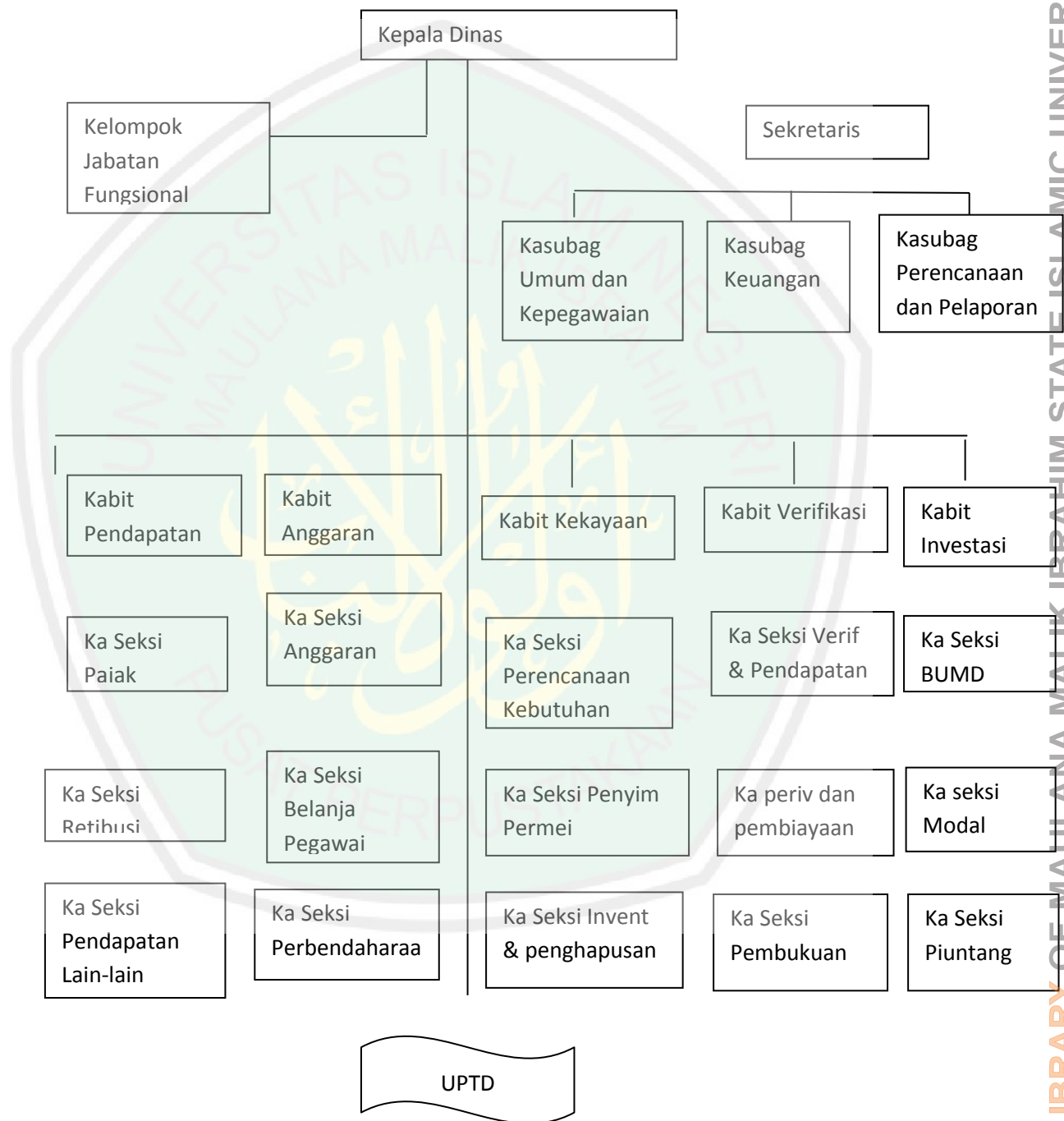
Fungsi DPPKA

1. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset
3. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset
4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
6. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban realisasi APBD
7. Pelaksanaan kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Tujuan

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam upaya mendukung Good Governance.

Gambar 4.1.4
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG



Sumber :Struktur Organisasi di BPKAD Kab Malang

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2013 – 2015.

Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

4.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Sumber: (UU 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat Daerah) Halim, 2004

Menurut Halim 2004, untuk mengetahui situasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Pola Hubungan, Kemandirian Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim,2004.

1. Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

4. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp201.395.878.609,93 Realisasi pendapatan sebesar Rp262.267.260.454 atau mencapai sebesar 130%.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013

No	Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	PENDAPATAN ASLIDAERAH	201.395.878.609,93	262.267.260.454,87	130,22
	Hasil Pajak Daerah	66.465.000.000,00	95.918.841.193,00	144,31
	Hasil Retribusi Daerah	50.812.639.000,00	45.314.153.759,39	89,18
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.210.834.000,00	12.007.868.773,33	98,34
	Lain-lain pendapatan yang sah	71.907.405.609,93	109.026.396.729,15	151,62
2	DANA PERIMBANGAN	1.697.127.602.371,00	1.700.485.365.220,00	100,20
	Bagi hasil pajak	94.175.332.679,00	89.105.461.106,00	94,62
	Bagi hasil bukan pajak	51.405.885.692,00	59.833.520.114,00	116,39
	Dana Alokasi Umum	1.439.234.034.000,00	1.439.234.034.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	112.312.350.000,00	112.312.350.000,00	100,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	68.720.765.000,00	68.770.765.000,00	100,07
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.492.993.699.038,93	2.529.685.862.151,87	101,47

Sumber : Data BPKAD Kab Malang dan data diolah

Pada tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringkali dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap objek pajak yang belum dibayar sesuai dengan perda dan melakukan pendataan terhadap objek pajak yang belum terpungut.

Adapun sumber pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan dari pemerintah/intansi yang lebih tinggi dan pinjaman pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang sah khususnya PAD terdiri dari beberapa komponen yang salah satunya adalah pajak daerah melampaui target yang diharapkan yaitu mencapai 144,31%, dimana komponen tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galihan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak PBB P2, pajak BPHTB merupakan sumber dana yang potensial dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah karena memberikan kontribusi terbanyak kedua terhadap total penerimaan PAD.

Dengan Demikian penerimaan pajak daerah yang merupakan komponen PAD dan APBD merupakan sumber penerimaan rutin yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. hal ini disebabkan desentralisasi memacu setiap daerah untuk mengelola penerimaan secara efektif dan efisiensi sehingga kemandirian dapat tercapai. Beberapa data dikabupaten malang yang memiliki luas kurang lebih 353.486 ha potensi yang dimiliki oleh pajak daerah

kabupaten malang belum tergali sepenuhnya, ditambah lagi dengan penundaan wajib pajak untuk melunasi beban pajaknya serta belum maksimalnya pengawasan pemungutan pajak, sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dapat diklasifikasi ulang pajak daerah yang potensial sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan. Dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan ,namun semua penerimaan pajak target yang ingin diperoleh belum dapat terealisasi.Hal ini disebabkan oleh penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan dari pemerintah/intansi yang lebih tinggi dan pinjaman pemerintah daerah. terdiri dari beberapa komponen yang kedua yaitu retribusi daerah mencapai 89,18%, dimana komponen tersebut yaitu pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, peayanan pengujian kendaran bermotor, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, izin mendirikan bangunan, izin gangguan/keramaian, izin ketenagakerjaan bahwa retribusi Sehingga hal ini semua pendapatan retribusi daerah target yang ingin diperoleh belum dapat terealisasi.Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi daerah dan penyimpangan dari petugas menarik retribusi yaitu tidak emberikan sebagai bukti pembayaran retribusi yang dipunggut serta hambatan keadaan perekonomian bangsa indonesia yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan Bagi pembayar Retribusi (pedagang), hendaknya selalu membayar retribusi pelayanan pasar, karena retribusi tersebut pada dasarnya akan

dimanfaatkan oleh pembayar Retribusi (pedagang) sendiri, yaitu sebagai dana untuk memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.

Bagi petugas, hendaknya pungutan dilakukan secara tepat artinya dilakukan dengan prosedur yang benar, sehingga tidak menimbulkan kebocoran pemasukan. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menarik retribusi dengan selalu memberikan tanda bukti pembayaran, serta melaporkan secara jujur perolehan retribusinya.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan daerah jasa yasa, penyertaan modal (deviden) Bank Jatim, dan deviden BPR Artha Kanjuruhan yang penerimannya mencapai 98,34% artinya target yang ingin diperoleh belum dapat terealisasi. Disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan solusinya yaitu dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Terkait terbatasnya anggaran untuk itu maka dilakukan secara bertahap, efisien dan efektif sehingga secara bertahap masalah sarana dan prasarana dapat teratasi dengan anggaran yang terbatas.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan dari pendapatan penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan tuntutan ganti rugi daerah mencapai sebesar 151,62%.

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari Dana penerimaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendapatan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp1.697.127.602.371,00 dan terealisasi sebesar Rp1.700.485.365.220,00 atau mencapai target 100,20%.

Bagi hasil pajak merupakan Bagi hasil bukan pajak terdiri dari, Bagi hasil pajak yang meliputi DHB Pajak bumi dan bangunan, DBH PPh pasal 25 dan pph pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang meliputi, bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi, bagi hasil dari pertambangan panas bumi. Penerimaan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2013 target sebesar Rp94.175.332.679,00 dan terealisasi sebesar Rp89.105.461.106,00 atau mencapai 94,62%.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar

Rp1.439.234.034.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.439.234.034.000,00 atau mencapai 100%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer kedaerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Pendapatan pemerintah kabupaten Malang yang bersumber dari DAK pada tahun 2013 target yang diharapkan sebesar Rp112.312.350.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp112.312.350.000,00, atau mencapai 100%.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perenerimaan Pemerintah kabupaten Malang yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain. Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp68.720.765.000, dan terealisasikan sebesar Rp68.770.765.000,00 atau mencapai 100,07%.

Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam APBD sebagai berikut.

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	318.681.551.156,96	411.185.107.107,13	129,03
	Hasil Pajak Daerah	128.060.000.000,00	153.924.838.045,99	120,20
	Hasil retribusi daerah	49.510.444.434,00	51.905.681.732,00	104,84
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.783.338.249,45	12.670.468.247,73	99,12
	Lain-lain pendapatan yang sah	128.327.768.473,51	192.684.119.081,41	150,15
2	DANA PERIMBANGAN	1.814.561.573.431,00	1.831.998.927.025,00	100,96
	Bagi Hasil Pajak	41.955.421.208,00	62.046.707.697,00	147,89
	Bagi Hasil Buan Pajak	70.364.001.223,00	67.710.068.328,00	96,23
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.572.191.571.000,00	1.572.191.571.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	130.050.580.000,00	130.050.580.000,00	100,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	156.990.906.000,00	156.715.906.000,00	99,82
	Pendapatan Hibah	949.656.000,00	949.656.000,00	100,00
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	156.041.250.000,00	155.766.250.000,00	99,82
	Jumlah	2.959.431.197.409,96	3.058.671.277.833,13	103,35

Sumber : Data BPKAD Kab Malang dan data diolah.

Pada tabel 4.4 Terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target yang diharapkan Dalam hal ini PAD tahun 2014 relisasinya sebesar Rp411.185.107.107,13 atau mencapai 129,03% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp262.267.260.454,87 maka terjadi kenaikan penerimaan yang sebesar Rp148.915.723.815,91 atau 56,78%. Untuk Dana Perimbangan yang realisasinya pada tahun 2014 sebesar Rp1.831998.927.025,00 atau mencapai 100,96% dari target yang direncanakan, dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013

sebesar Rp1.700.485.365.220,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp131.513.561.805 atau mencapai 7,73%. Sedang untuk realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2014 sebesar Rp192.684.119.081,41 maka terjadi kenaikan sebesar Rp83.657.722.352 atau mencapai 76,73%. Ditahun 2014 relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan dengan komposisi pendapatan rata-rata secara nasional yang berada kurang dari 25% artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intnsifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap objek pajak yang belum dibayar sesuai dengan perda dan melakukan pendataan terhadap objek pajak yang belum terpungut.

Adapun sumber pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan dari pemerintah/intansi yang lebih tinggi dan pinjaman pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang sah khususnya PAD terdiri dari beberapa komponen yang salah satunya adalah pajak daerah melampaui target yang diharapkan yaitu mencapai 120,20%, dimana komponen tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galihan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak PBB P2, pajak BPHTB merupakan sumber dana yang potensial dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah karena memberikan kontribusi terbanyak kedua terhadap total penerimaan PAD.

Dengan Demikian penerimaan pajak daerah yang merupakan komponen PAD dan APBD merupakan sumber penerimaan rutin yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan desentralisasi memacu setiap daerah untuk mengelola penerimaan secara efektif dan efisien sehingga kemandirian dapat tercapai. Beberapa data Kabupaten Malang yang memiliki luas kurang lebih 353.486 ha potensi yang dimiliki oleh pajak daerah Kabupaten Malang belum tergali sepenuhnya, ditambah lagi dengan penundaan wajib pajak untuk melunasi beban pajaknya serta belum maksimalnya pengawasan pemungutan pajak, sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dapat diklasifikasi ulang pajak daerah yang potensial sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan. Dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan, namun semua penerimaan pajak target yang ingin diperoleh belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi dan pinjaman pemerintah daerah. terdiri dari beberapa komponen yang kedua yaitu retribusi daerah mencapai 104,84%, dimana komponen tersebut yaitu pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, izin mendirikan bangunan, izin gangguan/keramaian, izin ketenagakerjaan. Sehingga hal ini semua pendapatan retribusi daerah target yang ingin diperoleh belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran

wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi daerah dan penyimpangan dari petugas menarik retribusi yaitu tidak emberikan sebagai bukti pembayaran retribusi yang dipunggut serta hambatan keadaan perekonomian bangsa indonesia yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan Bagi pembayar Retribusi (pedagang), hendaknya selalu membayar retribusi pelayanan pasar, karena retribusi tersebut pada dasarnya akan dimanfaatkan oleh pembayar Retribusi (pedagang) sendiri, yaitu sebagai dana untuk memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.

Bagi petugas, hendaknya pungutan dilakukan secara tepat artinya dilakukan dengan prosedur yang benar, sehingga tidak menimbulkan kebocoran pemasukan. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menarik retribusi dengan selalu memberikan tanda bukti pembayaran, serta melaporkan secara jujur perolehan retribusinya.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan daerah jasa yasa, penyertaan modal (deviden) Bank jatim, dan deviden BPR Artha kanjuruhan yang penerimannya mencapai 99,12% artinya target yang ingin diperoleh belum dapat terealisasi. Disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan solusinya yaitu dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Terkait terbatasnya anggaran untuk untuk itu maka dilakukan secara bertahap ,efisien dan

efektif sehingga secara bertahap masalah sarana dan prasarana dapat teratasi dengan anggaran yang terbatas.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan dari pendapatan penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan tuntutan ganti rugi daerah mencapai sebesar 150,15%.

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari Dana penerimaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-undang Republik Indoneia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendapatan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1.814.561.573.431,00 dan terealisasi sebesar Rp1.831.998.927.025,00 atau mencapai target 100,96%.

Bagi hasil pajak terdiri dari, Bagi hasil pajak yang meliputi Pajak bumi dan bangunan, PPh pasal 25 dan PPH 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Target yang diharapkan sebesar Rp41.955.421.208,00 dan terealisasi sebesar Rp62.046.707.697,00 mencapai 147,89%.

Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang meliputi, bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi, bagi hasil dari pertambangan panas bumi. Penerimaan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2014 target sebesar Rp70.364.001.223,00 dan terealisasi sebesar Rp67.710.068.328,00 atau mencapai 96,23%.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.572.191.571.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.572.191.571.000,00 atau mencapai 100%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer kedaerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Pendapatan pemerintah kabupaten Malang yang bersumber dari DAK pada tahun 2014 target yang diharapkan sebesar Rp130.050.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.050.580.000,00, atau mencapai 100%.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pererimaan Pemerintah kabupaten Malang yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain. Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp156.990.906.000,00, dan terealisasikan sebesar Rp156.715.906.000,00 atau mencapai 99,82%.

Berikut ini penjelasan target dan realisasi pendapatan selama satu tahun anggaran, Adapun tabel Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	378.651.671.411,70	461.887.704.824,73	121,98
	Hasil Pajak Daerah	145.210.000.000,00	170.108.822.450,00	117,15
	Hasil retribusi daerah	36.603.021.910,00	40.403.196.760,00	110,38
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.265.700.699,20	18.340.914.239,20	138,26
	Lain-lain pendapatan yang sah	183.572.948.802,50	233.034.771.375,53	126,94
2	DANA PERIMBANGAN	1.916.862.152.593,00	1.893.231.262.923,00	98,77
	Bagi Hasil Pajak	58.352.960.000,00	43.296.246.280,00	74,20
	Bagi Hasil Bukan Pajak	91.999.615.593,00	83.422.781.643,00	90,68
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.613.161.777.000,00	1.613.161.777.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.347.800.000,00	153.350.440.000,00	100,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	61.929.983.054,00	19.994.558.900,00	32,29
	Pendapatan Hibah	20.711.267.000,00	19.994.558.900,00	96,54
	Pendapatan Lainnya	41.218.707.054,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.433.620.011.035,70	3.471.281.006.610,73	101,10

Sumber : Data BPKAD Kab Malang dan data diolah.

Dalam tabel 4.5 PAD tahun 2015 realisasinya sebesar Rp461.887.704.824,73 atau mencapai 121,98% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp411.185.107.107,13 maka terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp50.596.110.553,27 atau 12,30%. Untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2015 sebesar Rp1.893.231.262.923,00 atau mencapai 98,77% dari target yang direncanakan, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar

Rp1.831.998.927.025,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp61.232.335.898,00 atau 3,34%.

Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 realisasinya sebesar Rp61.929.983.054,00 atau mencapai 98,07%, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp949.656.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp300.674.795.162,00 atau 36,87%. Jika dilihat dari komposisi, PAD menyumbang 13,30% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2015. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 54,54% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 32,15%. Kontribusi PAD Kabupaten Malang yang sebesar 13,30% di tahun 2015 ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan komposisi pendapatan rata-rata kabupaten/kota secara nasional yang berada di kisaran 12,55%, artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan Rp378.651.671.411,70 dan dapat direalisasikan lebih besar dari target, yaitu sebesar Rp461.887.704.824,73 atau mencapai 121,98%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu mencapai 32,29% dari target anggaran Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Terlihat bahwa komponen hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melampaui target

relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2015 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Malang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah (terutama pajak), maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian

Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Yang Sah. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gololongan, Pajak Parkir; Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan PerdesaanPerkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan Rp145.210.000.000,00 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp170.108.822.450,00 atau penerimaannya mencapai 117,15%. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kabupaten Malang yang berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan baik

domestik maupun mancanegara. Adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap obyek pajak yang belum dibayar sesuai dengan peraturan daerah dan melakukan pendataan terhadap obyek pajak yang belum terpungut.

Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang. Diikuti berikutnya oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan Pajak Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan BPHTB beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah.

Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adapun terjadinya kenaikan target pada penerimaan BPHTB lebih banyak didukung oleh kegiatan perekonomian Kabupaten Malang yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat Kabupaten Malang.

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan aslidaerah Kabupaten Malang meliputi: Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi

Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara, Retribusi jasa. direncanakan sebesar Rp36.603.021.910,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp40.403.196.760, atau tingkat penerimaannya mencapai 110,38%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hal ini disebabkan berkurangnya sejumlah obyek-obyek pajak di wilayah Kabupaten Malang sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan, Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disebabkan adanya mutasi kendaraan keluar dan uji keluar wilayah Kabupaten Malang, terutama untuk jenis kendaraan truck, Retribusi Tempat Khusus Parkir disebabkan oleh berkurangnya potensi titik parkir khusus yang berada di wilayah Kabupaten Malang, Retribusi Izin Trayek yang disebabkan oleh penurunan jumlah kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada:Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Jasa Yasa, Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim, dan Deviden BPR Artha Kanjuruhan yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari danapenerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp1.916.862.152.593, dan terealisasi sebesar Rp1.893.231.262.923, atau mencapai target 98,77%.

Bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak terdiri dari, Bagi hasil pajak yang meliputi Pajak bumi dan bangunan, PPh pasal 25 dan PPh 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Target yang diharapkan sebesar Rp58.352.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.296.264.280,00 atau mencapai 74,20%.

Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang meliputi, bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi, bagi hasil dari pertambangan panas bumi. Penerimaan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2015 target sebesar Rp91.999.615.593,00 dan terealisasi sebesar Rp83.422.781.643,00 atau mencapai 90,68%.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan

sebesar Rp1.613.161.777.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.613.161.777.000, atau mencapai 100%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer kedaerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp153.347.800.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp153.350.440.000, atau mencapai 100%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp61.929.983.054,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp19.994.558.900,00 atau mencapai 32,29%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya yaitu:

1. Penerapan efektifitas prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD dan kualitas petugas pengelola administrasi masih perlu dioptimalkan.
2. Kurangnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan kurang memahami peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

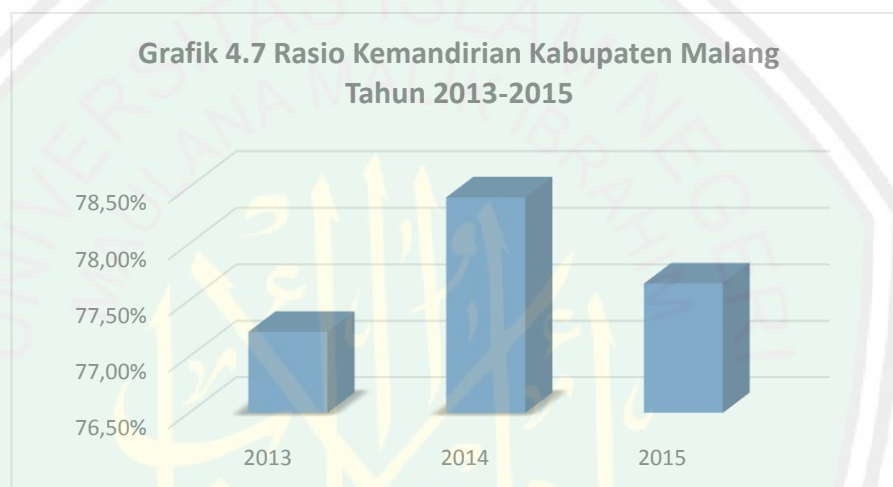
Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya yaitu:

1. Efektifitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu dioptimalkan dengan cara peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, serta mengoptimalkan kualitas petugas pengelola administrasi dengan cara meningkatkan kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan wawasan.
2. Perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD dengan cara meningkatkan profesionalisme manajemen Pemerintahan.
3. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seiring telah terbitnya UU RI No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi

Tabel 4.6
Rasio Kemandirian Kabupaten Malang Tahun 2013-2015

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat	Rasio Kemandirian
2013	262.267.260.454,87	1.700.485.365.220,00	11,84%
2014	411.185.107.107,13	1.831.998.927.025,00	17,56%
2015	461.887.704.824,73	1.893.231.262.923,00	19,75%

Sumber :Data diolah tahun 20017.



Sumber :Data diolah tahun 20018.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2013 s/d 2015 masih rendah sekali rata-rata 16,38% kurang dari 25%, pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Malang dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Karena besarnya sumber pendapatan dari bantuan pusat berupa dana transfer atau dana perimbangan didasarkan pada indikator penentuan besarnya penerimaan yang diterima oleh suatu daerah. Akan tetapi selama tiga tahun mengalami kenaikan ,

pada tahun 2014 dikarenakan pengalihan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah selain itu pajak penerangan jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang setelah PBB P2, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB kedalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adapun terjadinya penerimaan BPHTB lebih banyak didukung oleh kegiatan perekonomian Kabupaten Malang yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat Kabupaten Malang. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,19% menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah (terutama pajak), seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame. Penerimaan dari pajak daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015 dapat terealisasi sebesar Rp170.108.822.450,00.

Indikatornya, salah satunya yaitu jumlah penduduk. Penduduknya kabupaten Malang tiap tahunnya terus bertambah, luas wilayah walaupun tidak bertambah tetap dimasukkan dalam komponen perhitungan pemberian dana perimbangan, ada juga daerah yang memasukkan pulau- pulau yang dimiliki

daerah, berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena sebagian besar Dana Perimbangan atau dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat yang dibelanjakan daerah untuk membayar gaji PNS. Jadi kalau gaji PNS bertambah, otomatis biasanya ada juga penambahan terkait dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi kalau trennya bertambah, iya pasti pusat tidak bisa lepas. Tapi sedapat mungkin kedepannya pemerintah kabupaten berharap ketergantungan tersebut dapat berkurang dan juga pasti menjadi harapan pemerintah pusat besarnya dana transfer ke daerah, artinya daerah itu masih membutuhkan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rutinnnya, hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kabupaten Malang yang berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk membangun perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Maka untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, maka peran dari berbagai pihak khususnya peran pemerintah daerah itu sendiri sangat dibutuhkan. Bahwa peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses meningkatkan pembangunan ekonomi daerah terbagi menjadi empat, yaitu peran sebagai: *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Pertama, dengan adanya peran pemerintah sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan usaha bisnis. Salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yaitu dengan mewirasahkan Pantai Balekambang, Pantai Tiga Warna dan lain-lain. Wirausaha ini dilakukan oleh Pemerintah karena obyek wisata Pantai Balekambang memberi kontribusi berarti terhadap pembangunan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan besarnya alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini rincian pengalokasian pendapatan yang diperoleh dari obyek wisata Pantai Balekambang dibagi menjadi empat bagian yaitu: 55% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), 30% untuk cadangan umum PD. Jasa Yasa, 10% untuk kenaikan gaji pegawai, dan 5% untuk jasa produksi. Selain memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Malang, tumbuhnya perekonomian di sekitar Pantai Balekambang juga mengundang sektor retail pasar modern seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya menjamur dikawasan menuju pantai ini.

Kedua, dengan adanya peran pemerintah sebagai Koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya. Karena berperan sebagai koordinator, maka peran Pemerintah Kabupaten Malang lebih ditekankan pada: Pertama, merencanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai sektor yang berkaitan dengan pariwisata. pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya serta mengangkat sektor industri lainnya. Dengan demikian,

sektor pariwisata akan berfungsi sebagai pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang juga telah merencanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis sektor lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu strategi pencapaian visi-misi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang untuk 5 tahun ke depan dengan slogan “Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro-Wisata yang terkemuka di Jawa Timur”.

Ketiga, dengan adanya peran pemerintah sebagai fasilitator dilakukan dengan merencanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pengembangan wilayah. Pemerintah Kabupaten Malang juga berperan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara membangun Jalan Lintas Selatan (JLS). Pembangunan ini bermanfaat sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi terutama wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi terutama untuk wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi yang beragam dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan dibangunnya JLS yang ada di Kabupaten Malang, harapannya akan berdampak bagi peningkatan obyek wisata, khususnya pantai selatan Jawa, salah satunya Pantai Bakembang. Sedangkan perencanaan pengembangan wilayah sektor pariwisata Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan kawasan sebagai berikut: Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo; Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari; Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang; Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru di

Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan Paket Pantai Selatan Malang yang meliputi Pantai Kondang Merak, Ngliyep, Bajul Mati, dan Goa Cina. pengembangan wiayah ini merupakan fokus dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Keempat, dengan adanya peran pemerintah sebagai stimulator dilakukan dengan merencanakan pembangunan fasilitas listrik, air bersih, pembuangan sampah dan telekomunikasi. Pembangunan fasilitas listrik, air bersih, pembuangan sampah, dan telekomunikasi merupakan bagian dari pembangunan prasarana umum pariwisata. Untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas ini seharusnya menjadi sasaran dan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan suatu obyek wisata. Tapi pada kenyataannya dan berdasarkan yang telah dilakukan, perencanaan pembangunan fasilitas listrik, air bersih, pembuangan sampah, dan telekomunikasi hingga saat ini belum menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten bersama dinas terkait. Sebagai Stimulator dengan menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut

4.1.6 Ratio Aktifitas

Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Halim, 2004:20).

Rasio aktifitas dihitung sebagai berikut:

$$a. \text{ Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

$$b. \text{ Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{belanjaLangsung}}{\text{Total Belanja}}$$

Belanja daerah pemerintahan kabupaten malang pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp2.134.910.581.367,61 dan realisasinya sebesar Rp1.884.665.421.915,07 adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013

No	Uraian	Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.134.910.581.367,61	1.884.665.421.915,07	88,28
	Belanja Pegawai	1.429.807.808.907,59	1.326.448.684.146,00	92,77
	Belanja Barang dan Jasa	462.914.703.523,05	405.567.656.162,07	87,61
	Belanja Hibah	70.137.970.937,00	85.708.808.108,00	122,20
	Belanja Bantuan Sosial	66.413.250.000,00	66.234.873.200,00	99,73
	Belanja Bantuan Keuangan	105.636.848.000,00	705.400.227,00	0,67
2	BELANJA LANGSUNG	448.889;975.451,55	436.501.502.528,00	97,24
	Belanja Tanah	7.603.948.000,00	6.847.473.000,00	96,94
	Belanja Peralatan dan Mesin	69.585.878.329,70	62.461.879.915,00	89,76
	Belanja Bangunan dan Gedung	114.113.627.658,00	111.554.978.350,00	97,76
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	253.111.462.063,85	251.872.485.113,00	99,51
	Belanja Aset Lainnya	4.740.059.400,00	3.505.361.150,00	73,95
	Belanja Lainnya	275.000.000,00	259.325.000,00	94,30
	Jumlah	2.600.945.632.815,16	2.440.509.395.392,07	93,83

Sumber :BPKAD Kab Malang dan data diolah

Dilihat dari tabel 4.8 Belanja Tidak Langsung pada tahun 2013 komposisi, terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan. Belanja tidak langsung pada tahun 2013 target yang diharapkan sebesar Rp2.134.910.581.367,61 serta dapat direalisasikan sebesar Rp1.884.665.421.915,07 atau mencapai 88,28%.

Pada belanja pegawai pada tahun 2013 mencapai 92,77%. belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten malang.

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2013 target yang diharapkan sebesar Rp462.914.703.523,05 serta terealisasi sebesar Rp405.567.656.162,07 atau mencapai 87,61% Diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja antara lain dalam bentuk belanja bahan habis pakai kantor, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, keperluan barang cetakan dan penggandaan, belanja sewa, makan minum, pakaian dinas dan perjalanan dinas.

Belanja Hibah pada tahun 2013 target yang diharapkan sebesar Rp70.137.970.937,00 direalisasikan sebesar Rp85.708.808.108,00 atau mencapai 122,20%. Digunakan untuk belanja dalam bidang keagamaan, belanja hibah dalam bidang olahraga, belanja hibah kepada keprofesian, belanja hibah bidang kesehatan, belanja hibah bidang peranan wanita, belanja hibah kepada anggota masyarakat, belanja hibah bidang pendidikan.

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2013 target yang diharapkan Rp66.413.250.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp66.234.873.200,00. Digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, bantuan sosial untuk

keagamaan, bantuan sosial untuk kesejahteraan sosial, bantuan sosial untuk guru swasta, bantuan sosial untuk stimulan perumahan swadaya.

Belanja Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp105.636.848.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp705.400.227,00 atau mencapai 0,67%. Belanja ini digunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa, dan belanja keuangan kepada partai politik.

Dilihat dari tabel 4.8 pada tahun 2013 Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan dan Irigasi, Belanja Aset Lainnya, Belanja Lainnya. Belanja langsung pada tahun 2013 target yang diharapkan sebesar Rp448.889.975.451,55 serta dapat direalisasikan sebesar Rp436.501.502.528,00 atau mencapai 97,24%.

Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp7.603.948.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp6.847.473.000,00 atau mencapai 96,94%. Belanja ini digunakan untuk Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp69.585.878.329,70 dan telah terealisasi sebesar Rp62.461.879.915,00 atau mencapai 89,76%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja Bangunan dan Gedung pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp114.113.627.658,00 dan telah terealisasi sebesar Rp111.554.978.350,00 atau mencapai 97,76%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian, notaris, dan pajak.

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp253.111.462.063,85 dan telah terealisasi sebesar Rp251.872.485.113,00 atau mencapai 99,51%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp 4.740.059.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.505.361.150,00 atau mencapai 73,95%. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset lainnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Aset Lainnya pada tahun anggaran 2013 target yang diharapkan sebesar Rp275.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp259.325.000,00 atau mencapai 73,95%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.583.898.046.289,65	2.245.968.270.412,17	86,92
	Belanja Pegawai	1.678.960.609.121,95	1.499.632.101.394,43	89,32
	Belanja Barang dan Jasa	703.701.178.391,70	615.017.918.829,74	87,40
	Belanja Hibah	84.322.550.318,00	115.434.008.000,00	136,90
	Belanja Bantuan Sosial	15.295.250.000,00	15.115.149.000,00	98,82
	Belanja Bantuan Keuangan	101.618.458.458,00	769.032.588,00	0,76
2	BELANJA LANGSUNG	553.546.150.418,03	501.503.673.434,00	90,60
	Belanja Tanah	9.676.164.000,00	9.260.175.000,00	95,70
	Belanja Peralatan dan Mesin	113.501.723.848,00	82.003.305.911,00	72,25
	Belanja Bangunan dan Gedung	115.367.876.619,53	107.385.955.044,00	93,08
	Belanja Jalan, Irigasi	301.641.753.748,40	292.382.836.600,00	96,93
	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.358.632.202,00	10.471.400.879,00	78,39
	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.158.047.979.677,68	2.864.314.173.736,17	90,70

Sumber :BPKAD Kab Malang dan data diolah.

Dilihat dari tabel 4.9 Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014 komposisi, terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan. Belanja tidak langsung pada tahun 2014 target yang diharapkan sebesar Rp2.583.898.046.289,65 serta dapat direalisasikan sebesar Rp2.245.968.270.412,17 atau mencapai 86,92%.

Pada belanja pegawai pada tahun 2014 target yang diharapkan sebesar Rp1.678.960.609.121,95 serta terealisasi sebesar Rp1.499.632.101.394,43 atau mencapai 89,32%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten malang.

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2014 target yang diharapkan sebesar Rp703.701.178.391,70 serta terealisasi sebesar Rp615.017.918.829,74 atau mencapai 87,40%. Diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja antara lain dalam bentuk belanja bahan habis pakai kantor, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, keperluan barang cetakan dan penggandaan, belanja sewa, makan minum, pakaian dinas dan perjalanan dinas.

Belanja Hibah pada tahun 2014 target yang diharapkan sebesar Rp84.322.550.318,00 serta terealisasikan sebesar Rp115.434.008.000,00 atau mencapai 136,90%. Digunakan untuk belanja dalam bidang keagamaan, belanja hibah dalam bidang kepemudaan dan olahraga, belanja hibah kepada keprofesian, belanja hibah bidang kesehatan, belanja hibah bidang peranan wanita, belanja hibah kepada anggota masyarakat, belanja hibah bidang pendidikan.

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2014 target yang diharapkan sebesar Rp15.295.250.000,00 serta terealisasikan sebesar Rp15.115.149.000,00. Digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, bantuan sosial untuk keagamaan, bantuan sosial untuk kesejahteraan sosial, bantuan sosial untuk guru swasta, bantuan sosial untuk stimulan perumahan swadaya.

Belanja Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp101.618.458.458,00 dan telah terealisasi sebesar Rp769.032.588,00 atau mencapai 0,76%. Belanja ini digunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa, dan belanja keuangan kepada partai politik.

Dilihat dari tabel 4.9 Belanja Langsung pada tahun 2014 merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan dan Irigasi, Belanja Aset Lainnya, Belanja Lainnya. Belanja langsung pada tahun 2014 target yang diharapkan sebesar Rp553.546.150.418,03 serta dapat terealisasi sebesar Rp501.503.673.434,00 atau mencapai 90,60%.

Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp9.676.164.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp9.260.175.000,00 atau mencapai 95,70%. Belanja ini digunakan untuk Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp113.501.723.848,10 dan telah terealisasi sebesar Rp82.003.305.911,00 atau mencapai 72,25%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja Bangunan dan Gedung pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp115.367.876.619,53 dan telah terealisasi sebesar Rp107.385.955.044,00 atau mencapai 93,08%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian, notaris, dan pajak.

Belanja Jalan,Irigasi, dan Jaringan pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp301.641.753.748,40 dan telah terealisasi sebesar Rp292.382.836.600,00 atau mencapai 96,93%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp13.358.632.202,00 dan telah terealisasi sebesar Rp10.471.400.879,00 atau mencapai 78,39%. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset lainnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Aset Lainnya pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp0,00 dan telah terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%.

Tabel 4.10

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.784.029.735.041,56	2.499.92.959.122,56	89,78
	Belanja Pegawai	1.623.437.276.904,17	1.575.118.616.176,26	97,02
	Belanja barang dan jasa	1.033.009.280.787,39	696.908.174.767,30	67,46
	Belanja hibah	105.690.527.350,00	207.260.510.179,00	196,10
	Belanja Bantuan sosial	21.892.650.000,00	20.105.658.000,00	91,84
2	BELANJA LANGSUNG	736.124.647.714,00	714.192.895.223,19	97,02
	Belanja modal tanah	14.823.103.246,00	14.368.576.000,00	96,93
	Belanja peralatan dan mesin	179.029.845.731,75	167.954.918.186,19	93,78
	Belanja Modal gedung dan Bangunan	156.318.40212,90	150.017.737.290,00	95,97
	Belanja Modal Jalan,irigasi,dan Jaringan	383.503.312.038,35	380.427.768.577,00	99,20
	Belanja Moda Aset Tetap laina	2.385.984.545,00	1.426.896.170,00	59,80
	Jumlah	3.526.154.382.755,56	3.218.638.040.115,75	91,28

Sumber: BPKAD Kab Malang dan data diolah.

Dilihat dari tabel 4.10 Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 komposisi, terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja tidak langsung pada tahun 2015 target yang diharapkan sebesar Rp2.784.029.735.041,56 serta dapat direalisasikan sebesar Rp2.499.392.959.122,56 atau mencapai 89,78%.

Pada belanja pegawai pada tahun 2015 target yang diharapkan sebesar Rp1.623.437.276.904,17 serta terealisasi sebesar Rp1.575.118.616.176,26 atau mencapai 97,02%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan

tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten malang.

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2015 target yang diharapkan sebesar Rp1.033.009.280.787,39 serta terealisasi sebesar Rp696.908.174.767,30 atau mencapai 67,46%. Diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja antara lain dalam bentuk belanja bahan habis pakai kantor, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, keperluan barang cetakan dan penggandaan, belanja sewa, makan minum, pakaian dinas dan perjalanan dinas.

Belanja Hibah pada tahun 2015 target yang diharapkan sebesar Rp105.690.527.350,00 serta terealisasi sebesar Rp207.260.510.179,00 atau mencapai 196,10%. Digunakan untuk belanja dalam bidang keagamaan, belanja hibah dalam bidang olahraga, belanja hibah kepada keprofesian, belanja hibah bidang kesehatan, belanja hibah bidang peranan wanita, belanja hibah kepada anggota masyarakat, belanja hibah bidang pendidikan.

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2015 target yang diharapkan sebesar Rp21.892.650.000,00 serta terealisasi sebesar Rp20.105.658.000,00 atau mencapai 91,84%. Digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, bantuan sosial untuk keagamaan, bantuan sosial untuk kesejahteraan sosial, bantuan sosial untuk guru swasta, bantuan sosial untuk stimulan perumahan swadaya.

Dilihat dari tabel 4.10 Belanja Langsung pada tahun 2015 merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan dan Irigasi, Belanja Aset Lainnya. Belanja langsung pada tahun 2015 target yang diharapkan sebesar Rp736.124.647.714,00 serta dapat terealisasi sebesar Rp714.192.895.223,19 atau mencapai 97,02%.

Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2015 target yang diharapkan sebesar Rp14.823.103.246,00 dan telah terealisasi sebesar Rp14.368.576.000,00 atau mencapai 96,93%. Belanja ini digunakan untuk Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2015 target yang diharapkan sebesar Rp179.093.845.731,75 dan telah terealisasi sebesar Rp167.954.918.186,19 atau mencapai 93,78%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja Bangunan dan Gedung pada tahun anggaran 2014 target yang diharapkan sebesar Rp156.318.402.152,90 dan telah terealisasi sebesar Rp150.017.737.290,00 atau mencapai 95,97%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian, notaris, dan pajak .

Belanja Jalan,Irigasi, dan Jaringan pada tahun anggaran 2015 target yang diharapkan sebesar Rp383.503.312.038,35 dan telah terealisasi sebesar Rp380.424.768.577,00 atau mencapai 99,20%. Belanja ini digunakan untuk Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2015 target yang diharapkan sebesar Rp2.385.984.545,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.426.895.170,00 atau mencapai 59,80%. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset lainnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 4.11

Rasio Aktivitas Belanja Rutin Kabupaten Malang Tahun 2013-2015

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Belanja Rutin APBD %
2013	1.884.665.421.915,07	2.440.509.395.392,07	77,22
2014	2.245.968.270.412,17	2.864.314.173.736,17	78,41
2015	2.499.392.959.122,56	3.218.638.040.115,75	77,65

Sumber : Data diolah tahun 2017.

Tabel 4.12

Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2013-2015

Tahun	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Rutin APBD %
2013	436.501.502.528,00	2.440.509.395.392,07	17,88
2014	501.503.673.434,00	2.864.314.173.736,17	17,50
2015	714.192.895.223,19	3.218.638.040.115,75	22,18

Sumber : Data diolah Tahun 2017



Sumber : Data diolah tahun 2018.

Pada tabel 4.11 dan 4.12 terlihat bahwa Dengan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan,

pangan dan Dari perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin. Sehingga selama kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2013 sampai dengan 2015 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan yaitu sebesar 77,76% untuk rasio aktivitas belanja rutin digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial, dan Belanja Bantuan keuangan. Belanja Rutin ini setiap bulannya harus dikeluarkan karena menjadi kewajiban pemerintah daerah., sedangkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan hanya sebesar 19,18%, memang sangat jauh berbeda belanja rutin sebesar 77,66% dan belanja pembangunan yang sebesar 19,18% karena belanja pembangunan itu bersifat jangka panjang dan tidak setiap bulan dibutuhkan. Maka diperlukan minimalisasi anggaran untuk belanja rutin guna dialokasikan untuk belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat kabupaten malang.

Belanja daerah merupakan faktor penting yang digunakan dalam tingkat-tingkat kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah sendiri memiliki berbagai unsur yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 101/ PMK.02. 2011 tentang klasifikasi anggaran belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran

pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bisinggungan langsung dengan pelayanan publik oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan).

Pada dasarnya Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini terkait Beanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan sebagai berikut :Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar, memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain, menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah, Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan, dan merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan rill sehingga terjadi penghematan anggaran karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

4.1.7 Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 1(satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{Anggaran PAD}}$$

Sumber : Halim,2004.

Tabel 4.14
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

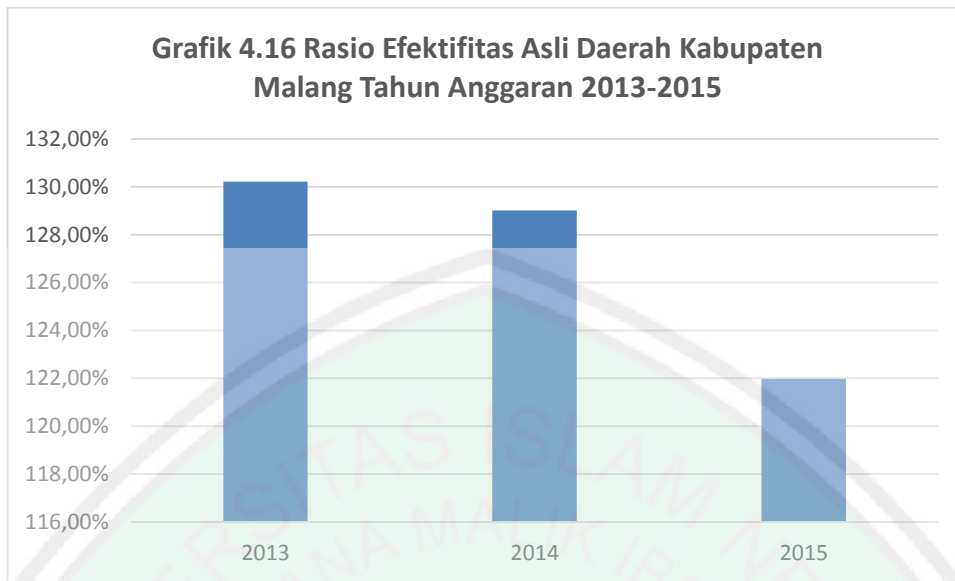
Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% -keatas	Sangat efektif
90% -100%	Efektif
80% -90%	Cukup efektif
60% -80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Halim, 2004.

Tabel 4.15
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektifitas %
2013	262.267.260.454,87	201.395.878.609,93	130,22
2014	411.185.107.107,13	318.681.551.156,96	129,02
2015	461.887.704.824,73	378.651.671.411,70	121,98

Sumber: Data diolah 2017



Sumber : Data diolah tahun 2018.

Pada tabel 4.15 Dari perhitungan rasio efektifitas bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten malang pada tahun 2013 dan 2015 rata-rata 127,07% diatas 100% sangat efektif hal tersebut dikarenakan penerimaan dari sektor seperti pajak daerah dan retribusi melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Malang juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatanya yang telah ada. Adapun sumber pendapatan yang meliputi PAD terdiri dari beberapa komponen yang salah satunya adalah pajak daerah melampaui target yang diharapkan yaitu mencapai 127,22%, dimana komponen tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galihan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak PBB P2, pajak BPHTB, retribusi daerah mencapai 101,46%, dimana komponen

tersebut yaitu pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, peayanan pengujian kendaran bermotor, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, izin mendirikan bangunan, izin gangguan/keramaian, izin ketenagakerjaan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan daerah jasa yasa, penyertaan moda yang penerimaannya mencapai 111,90%%, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan dari pendapatan penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan tuntutan ganti rugi daerah mencapai 142,90%. dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

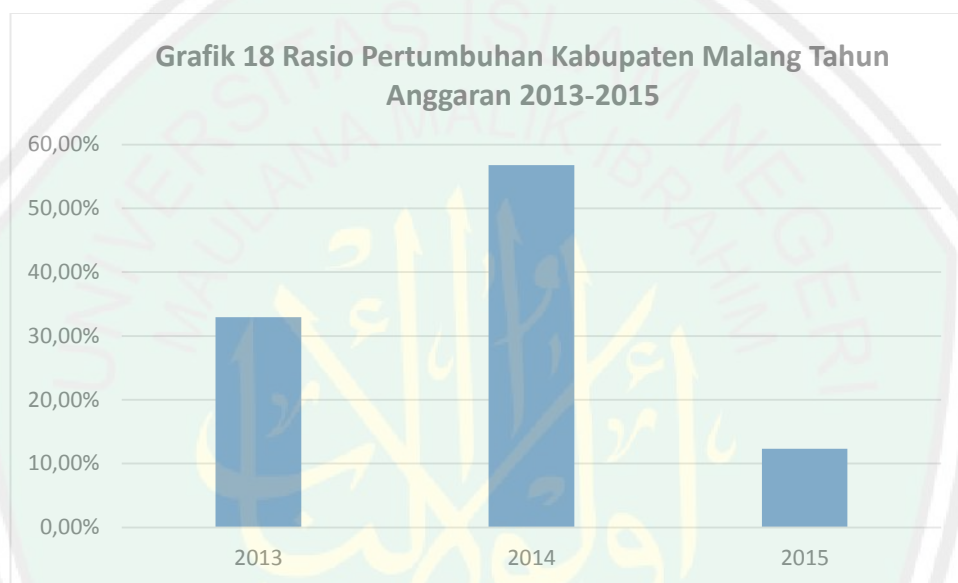
4.1.8 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Tabel 4.17
Rasio Pertumbuhan Kabupaten Malang Tahun 2013-2015

Tahun	PAD _{t0}	PAD _{t1}	RasioPertumbuhan%
2013	197.253.958.804,55	262.267.260.454,87	32,95
2014	262.267.260.454,87	411.185.107.107,13	56,78
2015	411.185.107.107,13	461.887.704.824,73	12,33

Sumber: Data diolah 2017.



Sumber : Data diolah tahun 2018.c

Pada tabel 4.17 bahwa Dari pertumbuhan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2013-2015 mengalami fluktuasi dimana mengalami peningkatan rasio pertumbuhan ditahun 2013 sebesar 32,95%, ditahun 2014 mengalami peningkatan pendapatan daerah yaitu sebesar 56,78%, tetapi untuk tahun 2015 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 12,33%.

Adapun sumber pendapatan yang mengalami peningkatan PAD terdiri dari beberapa komponen yang salah satunya adalah pajak daerah melampaui target

yang diharapkan yaitu mencapai 127,22%, dimana komponen tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galihan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak PBB P2, pajak BPHTB, retribusi daerah mencapai 101,46%, dimana komponen tersebut yaitu pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, peayanan pengujian kendaran bermotor, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, izin mendirikan bangunan, izin gangguan/keramaian, izin ketenagakerjaan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan daerah jasa yasa, penyertaan moda yang penerimaannya mencapai 111,90%.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah, ada optimalisasi pendapatan daerah sekalipun belum maksimal. Adapun pajak daerah tidak tercapai, karena penerimaan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dipengaruhi oleh tingginya mutasi kendaraan keluar daerah. Sementara, kesadaran masyarakat Kabupaten Malang masih terbilang rendah untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dipengaruhi dengan menurunnya daya beli masyarakat. Pajak reklame juga menurun karena beralihnya masyarakat memasang reklame di media elektronik. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi daerah turun karena juga terjadi penurunan volume pengujian kendaraan barang, bus, dan kendaraan penumpang umum karena banyaknya mutasi ke daerah lain.

Oleh sebab itu perlu dilakukan kembali penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu dioptimalkan dengan cara peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, serta mengoptimalkan kualitas petugas pengelola administrasi dengan cara meningkatkan kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan wawasan, Perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD dengan cara meningkatkan profesionalisme manajemen Pemerintahan, Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seiring telah terbitnya UU RI No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.

Kemuliaan seorang manusia itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekati seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan yang demikian selain memperoleh keberkahan serta kesenangan dunia, juga ada yang lebih penting yaitu merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang diakhirat kelak. Istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang dan malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara (Bustami,2012). Telah dijelaskan dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Agama Islam memandang bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja berikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Dalam melakukan setiap pekerjaan, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan. Seperti bekerja dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan hukum Allah atau syariat Islam. Etika kerja dalam Islam yaitu

1. Bekerja dengan niat mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 21 dan An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, (Qs Al-Baqarah :21)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa :59)

Adapun rahasia kesuksesan karier dan pekerjaan Rasulullah SAW adalah Pertama Rasulillah selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional, dan tidak asal-asalan. Beliau bersabda, “ sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya”. Kedua Rasulullah melakukannya dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas dan adanya penetapan skala prioritas. Ketiga Rasulullah tidak pernah menyalakan kesempatan sekecil apapun. “Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya, karena ia tidak tahu kapan ditutupkan kepadanya”. Bahwa dalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban setiap muslim. Kerja bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung makna ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses diakhirat kelak.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah Halim (2004), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Hasil penelitian dari perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Malang pada table 4.26 menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malang masih sangat rendah sekali. Karena tingkat kemandirian di Kabupaten Malang pada tahun 2013-2015 masih rendah sekali rata-rata 16,38% kurang dari 25% berdasarkan pola kemandirian menurut Halim (2004). Penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) yang menyatakan bahwa masih dalam kriteria sangat kurang mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunan. Kemandirian berarti mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri dari pada bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah dan ketergantungan bantuan terhadap pihak eksternal semakin rendah. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta lemahnya pengelolaan pemerintah terhadap kekayaan daerah yang tidak produktif sehingga tidak dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal.

4.2.2 Rasio Aktivitas

Pada tabel 4.11 dan 4.12 terlihat bahwa Dengan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan Dari perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin. Sehingga selama kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2013 sampai dengan 2015 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan yaitu sebesar 77,76% untuk rasio aktivitas belanja rutin digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial, dan Belanja Bantuan keuangan. Belanja Rutin ini setiap bulannya harus dikeluarkan karena menjadi kewajiban pemerintah daerah., sedangkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan hanya sebesar 19,18%, memang sangat jauh berbeda belanja rutin

sebesar 77,66% dan belanja pembangunan yang sebesar 19,18% karena belanja pembangunan itu bersifat jangka panjang dan tidak setiap bulan dibutuhkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayage (2014). Maka diperlukan minimalisasi anggaran untuk belanja rutin guna dialokasikan untuk belanja pembangunan untuk kepekingan masyarakat kabupaten malang.

Belanja daerah merupakan faktor penting yang digunakan dalam tingkat-tingkat kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah sendiri memiliki berbagai unsur yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 101/ PMK.02. 2011 tentang klasifikasi anggaran belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang besinggungan langsung dengan pelayanan publik oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan).

Pada dasarnya Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini terkait Beanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain

masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan sebagai berikut :Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar, memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain, menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah, Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan, dan merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan rill sehingga terjadi penghematan anggaran karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

4.2.3 Rasio Efektifitas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halim (2004) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah yang ada sudah sangat efektif. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hasil perhitungan dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Tahun Anggaran 2013 – 2015 pada tabel 4.15, menggambarkan bahwa Kabupaten Malang sudah dapat mencapai target yang berarti sangat efektif sesuai dengan kriteria efektifitas yang ada karena telah dapat mencapai lebih dari 100%, Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayage (2014) bahwa tingkat efektifitas keuangan daerah selama tiga tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan menurut skala penghitungan yang menunjukkan kriteria sangat efektif, yaitu berada pada persentase >100%. Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang positif bagi Kabupaten Malang dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan. Kemampuan Kabupaten Malang dalam meraup PAD yang telah ditargetkan menandakan di Kabupaten Malang masih memiliki banyak sumber PAD yang apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantu tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan . Namun target yang di tetapkan oleh pemerintah daerah tersebut masih terlalu kecil.

4.2.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah untuk mengetahui komponen-komponen (Pendapatan, PAD, Belanja, Belanja Rutin dan sebagainya) mana yang perlu mendapatkan perhatian sebaiknya melihat terlebih dahulu pertumbuhan komponen-komponen tersebut. Selain ini rasio pertumbuhan ini akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Sebaiknya pertumbuhan ini dinyatakan dalam bentuk persentase Penghitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.17 di atas diketahui bahwa laju

pertumbuhan PAD Pada tabel 4.17 bahwa Dari pertumbuhan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2013-2015 mengalami fluktuasi dimana mengalami peningkatan rasio pertumbuhan ditahun 2013 sebesar 32,95%, ditahun 2014 mengalami peningkatan pendapatan daerah yaitu sebesar 56,78%, tetapi untuk tahun 2015 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 12,33%.

Adapun sumber pendapatan yang mengalami peningkatan PAD terdiri dari beberapa komponen yang salah satunya adalah pajak daerah melampaui target yang diharapkan yaitu mencapai 127,22%, dimana komponen tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galihan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak PBB P2, pajak BPHTB, retribusi daerah mencapai 101,46%, dimana komponen tersebut yaitu pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, peayanan pengujian kendaran bermotor, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, izin mendirikan bangunan, izin gangguan/keramaian, izin ketenagakerjaan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan daerah jasa yasa, penyertaan moda yang penerimaannya mencapai 111,90%.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah, ada optimalisasi pendapatan daerah sekalipun belum maksimal. Adapun pajak daerah tidak tercapai, karena penerimaan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dipengaruhi oleh tingginya mutasi kendaraan keluar daerah.

Sementara, kesadaran masyarakat Kabupaten Malang masih terbilang rendah untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dipengaruhi dengan menurunnya daya beli masyarakat. Pajak reklame juga menurun karena beralihnya masyarakat memasang reklame di media elektronik. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi daerah turun karena juga terjadi penurunan volume pengujian kendaraan barang, bus, dan kendaraan penumpang umum karena banyaknya mutasi ke daerah lain.

Oleh sebab itu perlu dilakukan kembali penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu dioptimalkan dengan cara peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, serta mengoptimalkan kualitas petugas pengelola administrasi dengan cara meningkatkan kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan wawasan, Perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD dengan cara meningkatkan profesionalisme manajemen Pemerintahan, Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seiring telah terbitnya UU RI No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Agustiarayani (2010) yang menunjukkan rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan 11,57% dari tahun sebelumnya, karena berkurangnya penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah. karena berkurangnya pendapatan lain lain yang sah. Namun pemerintah daerah cepat untuk bangkit kembali sehingga

pertumbuhannya terus meningkat. Peran serta pemerintah sangatlah penting dalam sebuah pertumbuhan daerahnya terutama pertumbuhan PAD, sebab pemerintah daerah yang memiliki hak untuk membuat peraturan hal apa saja yang bisa menjadi pajak daerah dalam sebuah peraturan daerah serta izin dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Malang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang sampai dengan tahun anggaran 2013-2015 persentase sebesar 16,38% perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya. Artinya adalah ketergantungan daerah masih sangat tinggi, terutama terhadap penerimaan dari bantuan pemerintah pusat berupa DAU/DAK.
2. Untuk rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2013-2015 rata-ratanya mencapai 127,07% diatas 100% artinya sangat efektif karena penerimaan dari sektor seperti pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Untuk rasio aktivitas keuangan daerah Kabupaten Malang, tahun anggaran 2013-2015 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin mencapai 77,76% sedangkan rata-rata untuk rasio aktivitas belanja pembangunan mencapai 19,18% sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD relatif kecil.
4. Untuk rasio Pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2013-2015 rata-rata mencapai 34,02% menunjukkan

pertumbuhan rata-rata yang positif meskipun ada kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari rasio belanja pembangunan masih sangat kurang.

5.2. SARAN-SARAN

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kabupaten Malang serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Malang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi dengan perluasan lapangan kerjadia Kabupaten Malang agar pendapatan masyarakat Kabupaten Malang meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula.
3. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten

Malang dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Malang.

4. Untuk rasio pertumbuhan, pemerintah sebaiknya mengadakan pendekatan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, serta melakukan langkah- langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahannya (2004) Departemen Agama RI Republik Indonesia
Cv Penerbit J-ART
- Abdul, Halim (2004). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Akuntansi Keuangan Daerah*
Jakarta: Salemba Empat
- Agustina (2013) *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat
Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah tahun Anggaran 2007-
2011*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)
- Agustiriyani (2010) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Malang*
(Skripsi di publikasikan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya)
- Arikunto, Suharismi (2015). *Akuntansi Sektor Pulik, Edisis Pertama*. Yogyakarta:
Bumi Aksara
- Bastian, Indra. (2001). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN-
Maliki press
- Brigham, F, Eugene (2010). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta.
- Bayage (2014) Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Era Otonomi Di
Kabupaten Malang.) *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN
Maulana Malik Ibrahim, Malang)
- Diana, Nur Ilvi .(2012). *Hadist-hadist ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press
Malang
- Engel F James dkk. (1994) *Manajemen Keuangan edisi keenam*. Jakarta: Binarupa
Aksara
- Fahmi, Irhan (2012). *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan kedua*. Bandung:
Alfabeta.
- Hadist Arbain An-Nawawi. Bukhari no. 6018, Muslim no. 47.
- Haouston, Brigham. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku ke satu*.
Jakarta: Salemba empat.
- Kadarwati. (2012) Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Skripsi* (Dipublikasikan).
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mahmudi (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM. YPKN.

- Munawir, S (2002). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Prastowo, Dwi (2002). *Analisis Laporan Keuangan (Konsep Dan Aplikasi)*. Edisi Kedua. Yogyakarta:
- Ridwan S, Sundjaja (2002). *Manajemen Keuangan Dua, Edisi Keempat*. Jakarta: Liberta Lintas
- Sutrisno,(2003).*Manajemen Keuangan, Edisi Pertama..* Yogyakarta: EKONISIA
- <http://Warta-malang.com> Kabupaten Malang Dalam Angka. Diakses pada 18 Oktober 2016



BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewi Latifa
 NIM/ Jurusan : 12510188/ Manajemen
 Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM
 JudulSkripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Malang
 Tahun Anggaran 2013-2015

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	05 Februari 2016	Surat Bimbingan	1. 
2.	23 Maret 2016	Latar Belakang	2. 
3.	06 April 2016	Revisi BAB I, II, III	3. 
4.	09 April 2016	Revisi BAB I, II, III	4. 
5.	16 Mei 2016	Revisi BAB I, II, III	5. 
6.	05 Juli 2017	Revisi BAB I, II, III	6. 
7.	19 Juli 2017	Revisi BAB IV	7. 
8.	24 Juli 2017	Revisi BAB IV	8. 
9.	13 Agustus 2017	Revisi BAB IV	9. 
10.	18 Agustus 2017	Revisi BAB IV	10. 
11.	23 Agustus 2017	Revisi BAB V	11. 
12.	28 Agustus 2017	Acc	12. 

Malang, 29 Agustus 2017

Mengetahui:
 Ketua Jurusan Manajemen,


 Drs. Agus Sucipto, MM
 NIP. 196708162003121001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 024/BAN-PT/Ak-X/S1/II/2013
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144, Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dewi Latifa
NIM : 12510188
Fakultas : Ekonomi.
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Keuangan

Dinyatakan telah Lulus Ujian Seminar Proposal pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 17 Mei 2016
Pukul : 13.00-14.00 Wib.

Tempat : Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 01 Juni 2016
Staf Bagian Akademik



Arif Pujiwaluyo, SE

Catatan :

- Di fotokopi 1x sebagai syarat pendaftaran komprehensif.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ *87* /421.205/2016

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Ekonomi Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang nomor Un.3.5/PP.00/239/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal : Ijin
Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Dewi Latifa/ Mhs.Fak. Ekonomi UIN Malang

Alamat : Jl. Gajayana no. 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Malang
Tahun Anggaran 2010 - 2014

Daerah/tempat kegiatan : BPKAD Kab. Malang

Lamanya : 3 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 16 Februari 2016
An **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Budianto
Budianto/Hermawan SH.MSi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Ekonomi UIN Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang
3. Sdr. Mhs/ Ybs
4. Arsip

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Dewi Latifa
Tempat, tanggal lahir : Malang, 09 Februari 1994
Alamat Asal : Jalan Raya Wonorejo Kec Poncokusumo Kab Malang
Telepon/Hp : 082234090263
Email : dewilatifa150@gmail.com
Facebook : Dewi Latifa

Riwayat pendidikan

2000-2006 : SDN 2 Wonorejo Kec Poncokusumo Kab Malang
2006-2009 : MTS AL-ITTIHAD Belung Kec Poncokusumo Kab Malang
2009-2012 : SMAN 1 TUMPANG

Pendidikan Non Formal

2012 : Mahad Sunan Ampe Al-Aly
2012 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN MALIKI
malang
2013 : *English Language Center* (ELC) UIN MALIKI Malang

Malang, 02 Januari 2018

Dewi Latifa



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Lampiran I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Nomor : ...
TAHUN 2014
Tanggal : ...

NO. URUT	TRAILAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	PENDAPATAN	2.492.993.699.038,93	2.529.685.862.151,87	101,47	2.218.403.705.873,55
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	201.395.878.629,93	202.287.260.454,87	130,22	197.253.558.894,55
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	66.465.000.000,00	93.918.941.193,00	144,31	71.301.888.477,01
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	50.812.639.000,00	45.314.153.759,39	89,13	42.775.824.434,05
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.210.834.000,00	12.007.868.773,33	98,34	10.508.131.832,54
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.907.405.609,93	109.026.396.729,15	151,62	72.668.104.090,05
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.222.877.055.429,00	2.198.647.836.697,00	98,91	1.952.341.007.069,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.597.127.602.371,00	1.400.485.365.220,00	100,20	1.547.449.634.110,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	- 54.175.332.679,00	89.105.461.106,00	94,62	91.800.006.780,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	- 51.405.885.692,00	59.833.520.114,00	116,39	55.798.450.350,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.439.234.034.000,00	1.439.234.034.000,00	100,00	1.281.612.867.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	112.312.350.000,00	112.312.350.000,00	100,00	118.237.360.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	388.452.049.812,00	378.878.002.000,00	95,48	295.633.435.005,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	388.452.049.812,00	378.878.002.000,00	95,48	295.633.435.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	137.297.403.246,00	127.284.469.477,00	92,71	109.308.887.959,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	137.297.403.246,00	127.284.469.477,00	92,71	109.308.887.959,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	68.720.765.000,00	68.770.765.000,00	100,07	68.758.740.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	68.720.765.000,00	68.770.765.000,00	100,07	68.758.740.000,00
2	BELANJA	2.600.945.632.815,16	2.440.509.395.392,07	93,83	2.221.707.105.580,75
2.1	BELANJA OPERASI	2.134.910.581.367,61	1.884.665.421.915,07	88,28	1.742.973.417.246,39
2.1.1	Belanja Pegawai	1.429.807.808.907,56	1.326.448.664.146,00	92,77	1.229.957.171.467,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	462.914.703.523,05	405.567.656.162,07	87,61	304.298.404.332,45
2.1.3	Belanja Hibah	70.137.970.937,00	85.708.808.180,00	122,20	48.093.809.050,00
2.1.5	Belanja Rantutan Sosial	66.413.250.000,00	66.234.873.200,00	99,73	65.000.503.288,94
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	105.636.848.000,00	705.400.227,00	0,67	95.618.528.958,00
2.2	BELANJA MODAL	448.889.975.451,55	436.501.502.528,00	97,24	464.305.242.451,57
2.2.1	Belanja Tanah	7.063.948.000,00	6.847.473.000,00	96,94	6.580.633.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	69.585.878.339,70	62.461.879.915,00	89,76	95.552.079.025,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	114.113.627.658,00	111.554.978.350,00	97,76	140.723.159.051,57

Handwritten notes:
1.3.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Handwritten notes:
BELANJA MODAL
Belanja Modal
Publik

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan dan Jaringan	253.111.462.063,85	251.872.485.113,00	99,51	219.781.736.000,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.740.059.400,00	3.505.361.150,00	73,95	1.027.823.705,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	275.000.000,00	259.325.000,00	94,30	169.761.600,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.900.000.000,00	1.695.673.632,00	89,25	994.812.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.900.000.000,00	1.695.673.632,00	89,25	994.812.000,00
2.4	TRANSFER	15.245.075.996,00	117.646.797.317,00	89,23	994.812.000,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa	15.245.075.996,00	14.631.182.317,00	95,97	13.433.633.882,79
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	14.215.073.996,00	13.673.514.317,00	96,19	12.515.174.720,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.030.000.000,00	957.668.000,00	92,98	917.459.152,79
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	103.013.615.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	103.013.615.000,00	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN	107.951.933.776,23	89.176.466.755,80	82,61	13.303.999.707,20
3.1	PEMERINTAH DAERAH	123.951.933.776,23	123.134.944.546,62	99,34	166.435.673.483,43
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	123.951.933.776,23	123.124.944.546,62	99,33	166.435.673.483,43
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembayaran Piutang Daerah	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PEMBELAYARAN DAERAH	16.000.000.000,00	17.694.629.138,70	110,59	39.180.340.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	16.694.629.138,70	111,30	10.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	28.180.340.000,00
3.2.3	Pembayaran P-bok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	107.951.933.776,23	105.440.315.407,92	97,67	127.255.333.483,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	194.616.782.167,72	0,00	123.951.933.776,23

BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

2014

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
1	PENDAPATAN	2.529.431.197,409,96	3.058.671.277.833,13	103,35	2.529.685.862.151,87
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	318.681.551.156,96	411.185.107.107,13	123,03	262.267.260.454,87
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	128.060.000.000,00	153.924.838.045,99	120,20	95.918.841.193,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	49.510.444.434,00	51.905.681.732,00	104,84	45.314.153.759,39
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.783.338.249,45	12.670.468.247,73	99,12	12.007.868.773,33
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.327.768.473,51	192.684.119.081,41	150,15	109.026.396.729,15
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.483.758.740.253,00	2.490.770.264.726,00	100,28	2.198.647.836.697,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.814.561.573.431,00	1.831.986.927.025,00	100,96	1.700.485.365.220,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	41.955.421.268,00	62.046.707.597,09	147,89	89.105.461.106,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	70.364.601.223,00	67.710.068.328,00	96,23	59.833.500.114,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.572.191.571.000,00	1.572.191.571.000,00	100,00	1.439.234.034.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	130.050.580.000,00	130.050.580.000,00	100,00	112.312.350.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	452.738.931.000,00	452.738.931.000,00	100,00	370.878.002.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	452.738.931.000,00	452.738.931.000,00	100,00	370.878.002.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	216.458.235.822,00	206.032.406.701,00	95,18	127.284.469.477,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	216.458.235.822,00	206.032.406.701,00	95,18	127.284.469.477,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	156.950.906.000,00	156.715.906.000,00	99,82	68.770.765.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	156.950.906.000,00	156.715.906.000,00	99,82	68.770.765.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Derurat	949.656.000,00	949.656.000,00	100,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	156.041.290.000,00	155.766.250.000,00	99,82	68.770.765.000,00
2.1	BELANJA OPERASI	3.158.047.979.577,68	2.864.314.173.736,17	90,70	2.440.509.303.392,07
2.1.1	Belanja Pegawai	2.583.898.046.289,45	2.245.968.270.412,17	86,92	1.884.665.411.915,07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.678.960.609.121,95	1.499.632.101.394,43	89,32	1.326.408.654.146,00
2.1.5	Belanja Hibah	703.761.178.391,70	615.017.918.829,74	87,40	405.367.606.162,07
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	84.322.580.318,00	115.434.008.600,00	136,90	85.708.808.180,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	15.295.250.000,00	15.115.149.000,00	98,82	66.234.873.200,00
2.2	BELANJA MODAL	101.638.158.458,00	769.032.588,00	0,76	705.400.227,00
2.2.1	Belanja Modal	533.546.180.418,03	501.503.672.434,00	90,00	436.501.502.525,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		[%]	REALISASI	
		2013	2013	2013	2012			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jambangan	253.111.462.063,85	251.872.485.113,00	99,51	219.781.736.000,00			
2.2.5	Belanja Asat Tetap Lainnya	4.740.059.400,00	3.505.361.150,00	73,95	1.027.823.705,00			
2.2.6	Belanja Asat Lainnya	275.000.000,00	259.325.000,00	94,30	169.761.600,00			
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.900.000.000,00	1.695.673.632,00	89,23	994.812.000,00			
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.900.000.000,00	1.695.673.632,00	89,23	994.812.000,00			
2.4	TRANSFER	15.245.075.996,00	117.646.797.317,00	771,70	13.433.633.882,79			
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa	15.245.075.996,00	14.631.152.317,00	95,97	13.433.633.882,79			
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	14.215.075.996,00	13.673.514.317,00	96,19	12.515.174.723,00			
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.030.000.000,00	957.668.000,00	92,98	917.459.152,79			
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	103.015.615.000,00	0,00	0,00			
2.4.2.1	Belanja Bantuan keuangan ke Desa	0,00	103.015.615.000,00	0,00	0,00			
3	PENBIAYAAN	[107.951.933.776,23]	89.176.466.755,80	[82,61]	[2.333.399.707,20]			
3.1	PENYERAHAN DAERAH	123.951.933.776,23	123.134.944.546,62	99,34	166.435.673.483,43			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Penhitungan Anggaran (SILPA)	123.951.933.776,23	123.124.944.546,62	99,33	166.435.673.483,43			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembayaran Pungutan Daerah	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
3.2	PENGELUARAN DAERAH	16.000.000.000,00	17.694.525.138,70	110,59	39.180.340.000,00			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	16.694.629.138,70	111,30	10.000.000.000,00			
3.2.2	Penyerahan Modal (Iurstaasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	28.180.340.000,00			
3.2.3	Pembayaran P-tok Uang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	107.951.933.776,23	105.440.315.407,92	97,67	127.255.333.483,43			
	PENBIAYAAN NETTO	0,00	194.616.782.167,72	0,00	123.951.933.776,23			

BUPATI MALANG,

H. REMDRA KRISNA

UNTOUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
4	PENDAPATAN - LRA	3.433.620.011.035,70	3.471.291.006.610,73	101,10	3.058.671.277.833,13
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	378.651.671.411,70	461.887.704.824,73	121,98	411.185.107.107,13
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	145.210.000.000,00	170.108.822.450,00	117,15	153.924.838.048,99
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	36.603.021.910,00	40.403.196.760,00	110,38	51.905.687.732,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	13.265.706.699,20	18.340.914.239,20	138,26	17.670.468.247,73
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	183.572.948.802,50	233.034.771.375,53	126,94	192.684.119.081,41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.993.038.356.570,00	2.959.398.742.886,00	99,88	2.646.536.514.726,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.910.862.152.593,00	1.893.231.262.923,00	98,77	1.831.998.927.025,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	58.352.960.000,00	43.236.264.280,00	74,20	62.045.707.697,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	91.999.615.593,00	83.422.781.643,00	90,68	67.710.068.328,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.613.161.777.000,00	1.613.161.777.000,00	100,00	1.572.191.571.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	153.347.800.000,00	153.350.440.000,00	100,00	130.050.580.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	581.206.056.000,00	581.206.056.000,00	100,00	452.738.931.000,00
4.2.2.3	Dana Penyertaan - LRA	581.206.056.000,00	581.206.056.000,00	100,00	452.738.931.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	193.906.054.977,00	213.897.330.963,00	110,31	206.032.406.701,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	193.906.054.977,00	163.989.032.065,00	84,57	169.543.034.546,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	0,00	49.908.298.898,00	0,00	36.489.372.155,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	301.064.093.000,00	301.064.093.000,00	100,00	155.766.250.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	301.064.093.000,00	301.064.093.000,00	100,00	155.766.250.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	61.829.883.654,00	19.994.558.900,00	32,29	949.656.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	20.711.276.000,00	19.994.558.900,00	96,54	949.656.000,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	41.218.707.054,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	3.526.154.382.755,56	3.218.638.040.115,75	91,28	2.749.202.286.258,17
5.1	BELANJA OPERASI	2.784.029.735.041,56	2.490.392.959.122,56	89,78	2.245.199.237.824,17
5.1.1	Belanja Pegawai	1.623.437.276.904,17	1.575.118.616.176,26	97,02	1.389.244.005.390,02
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.023.009.280.787,39	696.908.174.767,30	67,46	725.966.887.834,15
5.1.5	Belanja Hibah	105.690.527.356,00	207.260.510.179,00	196,10	114.873.195.600,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.892.650.000,00	20.105.658.000,00	91,84	15.115.149.000,00
5.2	BELANJA MODAL	736.124.647.714,00	714.192.895.223,19	97,02	501.503.673.434,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	14.823.103.246,00	14.368.576.000,00	96,93	9.260.175.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.093.845.731,75	167.954.918.186,19	93,78	82.003.305.911,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

7	PEMBIAYAAN	SURPLUS / (DEFISIT)							
7	PEMBIAYAAN	(14.360.780.512,86)		(66.955.402.018,02)		16,16		194.357.104.096,96	
7.1	PERERIMAAN PEMBIAYAAN								
7.1.1	Penggunaan SILPA	420.957.110.050,91		427.161.196.272,67		101,47		217.172.991.116,39	
7.1.2	Pencuraan Dana Cadangan	390.957.110.050,91		390.957.110.050,91		100,00		194.440.358.298,77	
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00		36.204.086.221,76		120,68		22.732.632.817,62	
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.596.329.538,05		8.111.913.987,10		122,98		20.572.985.162,44	
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00		1.515.584.449,05		0,00		19.572.985.162,44	
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.596.329.538,05		5.596.329.538,05		100,00		0,00	
		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		100,00		1.000.000.000,00	
		414.360.780.512,86		419.049.282.285,57		101,13		196.600.005.953,95	
	SISA LEPIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00		352.093.880.267,55		0,00		390.957.110.050,91	